



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

EDISI APRIL-JUNI 2025

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

DI BAWAH SEPATU LARS: ANCAMAN RUANG HIDUP MASYARAKAT ADAT

Di Balik Energi Bersih:
Nikel, Militer, dan Krisis
di Wilayah Adat

Menjaga Ibu Bumi,
Menggugat Ibu Kota
Perlawanan Perempuan
Adat Kaltim atas IKN





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolinggi

Pimpinan Umum

Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi

Direktur Infokom PB AMAN,
Titi Pangestu

Redaktur Pelaksana

Wulan Putri

Kepala Newsroom AMAN

Apriadi Gunawan

Redaktur Bahasa

Muammar Fikrie

Desain & Tata Letak

Taqi

Koordinator Foto

Giat Perwangsa

Kontributor

Ahmad Thariq (Islam Bergerak & FNKSDA); **Isnah Ayunda** (Jurnal Masyarakata Adat Kalimantan Timur); **Silas O. Kalami** (Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamo); **Hendi** (BPAN PKAM Kanonang, Minahasa, Sulawesi Utara); **Sri. T Shuket** (PHD PEREMPUAN AMAN Sekatak, Kalimantan Utara); **Joanny F. M. Pesulima** (Jurnal Masyarakata Adat Maluku); **Maruli Simanjuntak & Nestor Tambun** (Jurnal Masyarakata Adat Tano Batak).

Distribusi

Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@aman.or.id

Media Sosial

@AliansiMasyarakataAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakata Adat Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id

"Radio Gaung AMAN"

Portal Berita AMAN.or.id

AMAN.or.id

Militerisme di Wilayah Adat: Rezim Baru, Trauma Lama

04

Di Balik Energi Bersih: Nikel, Militer, dan Krisis di Wilayah Adat

06

12

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Menguak Rencana Food Estate di Merauke: Dari Militerisasi hingga Penggusuran Masyarakat Adat

17

Menjaga Ibu Bumi, Menggugat Ibu Kota Perlawanan Perempuan Adat Kaltim atas IKN



24



**Pendidikan Wun:
Antara Pewarisan Nilai,
Hak Masyarakat Adat,
dan Ketahanan Budaya**

31



**Delegasi AMAN Hadiri
Kongres Global Masyarakat Adat
dan Komunitas Lokal di Kongo**

27



**Kelelondey:
Perahu di Kaki Soputan yang
Dirusak Dentuman Senjata**

35



**Negeri Soya dan
Ritual Adat Cuci Negeri**

29



**Perempuan Adat Punan Tugung
Menganyam Pengetahuan,
Menenun Kemandirian**

40



**Nai Sinta dalam Kenangan
40 tahun Perlawanan Mengusir TPL**



Militerisme di Wilayah Adat: Rezim Baru, Trauma Lama

Oleh: **Rukka Sombolinggi**,
Sekretaris Jenderal AMAN.

Tentara sedang berbulan madu bersama pemerintahan Prabowo-Gibran. Militerisme kembali tumbuh subur, dan kian menancapkan cengkeramannya.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia disahkan hanya enam bulan sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. *Beleid* ini memicu protes mahasiswa dan masyarakat sipil karena dianggap merentangkan karpet merah bagi kembalinya dwifungsi TNI.

Tiga bulan sebelum revisi UU TNI, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi landasan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Tentara dilibatkan dalam posisi strategis. Operasinya bahkan dipimpin langsung oleh Kasum TNI, Letjen Richard Tampubolon.

Satgas ini konon telah menyita 1,1 juta hektare perkebunan sawit yang dianggap bermasalah. Namun, alih-alih dikembalikan fungsinya sebagai hutan, pemerintah justru membentuk BUMN baru, PT Agrinas Palma Nusantara, untuk meneruskan praktik perkebunan monokultur. Hutan tak kembali. Kebun sawit sekadar ganti pemilik.

Boleh jadi Prabowo terinspirasi dari mantan mertuanya, Soeharto. Keduanya sama-sama melihat hutan dalam kacamata proyek dagang, dan menempatkan tentara sebagai "penjaga". Di masa Orde Baru, rimba dibagi-bagi jadi konsesi, hutan adat dirampas, dan kayu-kayu diangkut. Bila ada yang melawan, aparat kekerasan negara siap sedia melakukan "penertiban."





Jejak kekerasan itu tercatat dalam *Inkuiri Nasional* yang diterbitkan Komnas HAM. Dokumen itu mengungkap 13 bentuk pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di kawasan hutan—mulai dari intimidasi, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, hingga penggusuran atau pemindahan paksa.

“Mereka (tentara dan brimob) lebih berpihak pada korporasi dan mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat serta hak-haknya. Mereka mengetahui hak-hak konstitusional Masyarakat Adat, namun lebih merasa wajib melindungi pihak korporasi,” tulis dokumen resmi negara itu.

Semasa Orde Baru, militer juga mengawasi ruang sipil lewat sistem komando teritorial, dari provinsi hingga desa. Alhasil, di kampung-kampung, kehadiran Babinsa jadi momok. Mereka hadir dan mengintervensi rapat-rapat desa. Hal itu beriring pula dengan UU Desa 1979 yang secara sistematis melemahkan Masyarakat Adat. *Indigenous governance* yang jadi ciri Masyarakat Adat dipreteli dan dilumpuhkan.

Kini sejarah terulang. Babinsa kembali masuk desa. Berlagak menjadi ahli pertanian, sekaligus jadi alat kekerasan untuk menyingkirkan Masyarakat Adat atas nama pembangunan. Itulah yang terjadi dalam proyek-proyek mercusuar, seperti PSN di Merauke, Papua Selatan.

Catatan Akhir Tahun AMAN 2024 memuat kritik atas keterlibatan militer dalam proyek transmigrasi besar-besaran ke Papua. Pemerintah bahkan membentuk Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk mendukung proyek transmigrasi. Akibatnya, Orang Asli Papua makin tersingkir. Di Merauke, misalnya, Orang Asli Papua kini hanya 38 persen dari total populasi.

Dulu Soeharto, sekarang Prabowo. Di mata Masyarakat Adat, militer telah membekas sebagai trauma. Mereka jadi simbol ideologi penaklukan dan perampasan wilayah adat. Kehadiran mereka membuat Masyarakat Adat tak bisa tidur tenang.

Bahkan, militerisme di era Prabowo bisa jadi lebih mengkhawatirkan. Apalagi dengan rencana pembentukan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Hal itu akan menelan anggaran besar, sekaligus jadi ironi di tengah retorika efisiensi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ingin berhemat tetapi malah membiayai pembangunan barak, menambah serdadu, dan belanja bedil.

Hingga hari ini, pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat lebih serius mengurus aturan-aturan terkait penetrasi militer di ruang-ruang sipil; menggelontorkan uang untuk pembiayaan tentara; mengubah hutan jadi kebun monokultur atau area tambang; dan mengebut proyek strategis nasional yang merampas wilayah adat.

Saat revisi UU TNI dengan cepat bisa dikebut, RUU Masyarakat Adat masih terkatung-katung di meja legislasi. Hijau loreng dianakemaskan. Hijau alam dikorbankan.

Kita, Masyarakat Adat dan para pejuang lingkungan, berulang kali dibungkam dan disingkirkan atas nama pembangunan. Namun, kisah-kisah kita tak hanya berisi luka dan trauma. Kisah kita juga penuh dengan keteguhan dan keberanian bahwa tak ada keadilan tanpa perjuangan.

Betapapun sulitnya situasi, langkah kita tak akan surut. Sampai menang!





Di Balik Energi Bersih: Nikel, Militer, dan Krisis di Wilayah Adat

Oleh: Wulan Putri,
Staf Infokom PB AMAN



*Tongkang Tambang membawa Ore Nikel
Mentah milik Tekondo di Weda, Maluku Utara.
Sumber Foto: tekindo.co.id.*

Pada 2022, Masyarakat Adat di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur berkali-kali melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspansi tambang nikel yang merusak hutan, mencemari sumber air, dan mengancam ruang hidup. Aksi ini terjadi di sekitar konsesi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Weda Bay Nickel (WBN), yang terus memperluas kawasan industri tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat terdampak. Represi pun menyusul, aparat keamanan dikerahkan untuk meredam perlawanan. Di banyak titik, aparat berdiri di barisan terdepan, bukan untuk melindungi warga, tetapi untuk memastikan kelancaran logistik tambang.

Sebelum mencuatnya gelombang perlawanan tersebut, pemerintah justru lebih dulu meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara yang menyuplai energi untuk smelter-smelter nikel di kawasan IWIP. Dalam waktu singkat, proyek ini mendapat lampu hijau dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ironisnya, di tengah gencarnya promosi “transisi energi” dan “industri hijau”, proyek ini justru bergantung pada energi fosil paling kotor. Alih-alih mewujudkan keadilan lingkungan, kebijakan ini justru merasionalisasi kekerasan atas nama percepatan pembangunan.

Di Halmahera Tengah, deforestasi masif terjadi sejak 2021. Data citra satelit Forest Watch Indonesia menunjukkan lebih dari 27.900 hektare hutan hilang, melepaskan 22,4 juta ton emisi karbon (FWI, 2023). Dampaknya jelas: erosi, longsor, dan rusaknya sistem hidrologi di Teluk Weda. Sejak 2019, banjir besar kerap melanda, sebagian besar terjadi setelah pembukaan hutan di hulu Sungai Kobe dan Sagea, wilayah konsesi tambang. Masyarakat Adat pesisir kehilangan sumber air bersih. Kampung-kampung di sekitar teluk kini rawan abrasi.



Pangdam XV/Pattimura, Mayjen Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi PT. IWIP, Weda, Halmahera tengah, Maluku Utara, dan disambut Vice President PT IWIP, Kevin He. Sumber Foto: malutsatu.com

Di Morowali, tekanan serupa terjadi. Kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berdiri di atas wilayah adat yang kini dibatasi pagar seng dan dipenuhi pabrik nikel. Aktivitas di dalam kawasan berlangsung sepanjang hari dan dijaga ketat oleh aparat TNI, Polri, serta satuan pengamanan perusahaan. Pos pengamanan perusahaan dan aparat keamanan didirikan di pintu masuk kampung, membatasi pergerakan Masyarakat Adat ke kebun, hutan larangan, dan situs adat. Tidak ada pelibatan Masyarakat Adat atau persetujuan atas pembangunan kawasan industri.

Pemerintah menyebut proyek ini bagian dari hilirisasi dan transisi energi. Namun kenyataannya, smelter disuplai listrik dari batu bara. Masyarakat Adat terdampak tidak diajak bicara, sementara protes ditanggapi dengan kekuatan bersenjata. Transisi energi berubah menjadi justifikasi baru untuk ekspansi industri di atas wilayah adat.

Jejak Militer di Balik Smelter

Militerisasi dalam proyek tambang nikel bukanlah fenomena baru. Akar kebijakan ini dapat ditelusuri sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang membuka ruang bagi ekspansi besar-besaran industri tambang di berbagai wilayah, termasuk tanah adat. Meski regulasi ini tidak secara eksplisit menyebut peran militer, dalam praktiknya aparat TNI—khususnya di tingkat Kodam dan Kodim—sering kali dilibatkan dalam pengamanan proyek, terutama saat terjadi konflik lahan.



Setelah UU Minerba berlaku, pemerintah mulai mempromosikan kawasan industri berbasis mineral. Saat bersamaan, struktur militer di daerah mulai bergeser. Komando Daerah Militer (Kodam) tidak hanya berperan menjaga pertahanan teritorial, tetapi dilibatkan secara aktif dalam pengamanan proyek-proyek strategis. Pangdam menjadi mitra utama kepala daerah dan perusahaan dalam pembukaan lahan.

Salah satu proses penting juga terjadi di Bahodopi sekitar tahun 2011–2013. Kodim 1311/Morowali, di bawah koordinasi Kodam VII/Wirabuwana, "mengawal" PT Bintang Delapan Mineral dengan mendirikan pos Koramil serta mendorong penerbitan IUP oleh Bupati Morowali pada masa itu untuk memperlancar proses survei dan pembebasan wilayah adat Wana. Perusahaan ini, anak usaha Bintang Delapan Group, mengantongi izin konsesi lebih dari 21.000 hektare sejak 2010, mencakup sembilan desa. Dua perwira tinggi purnawirawan, Letjen (Purn.) Sintong Panjaitan dan Mayjen (Purn.) Hendarji Supandji, duduk di jajaran komisarisnya. PT Bintang Delapan kemudian bermitra dengan Tsingshan Holding Group asal Tiongkok untuk mendirikan PT Sulawesi Mining Investment (SMI), yang kelak menjadi cikal bakal kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Masyarakat Adat Wana yang menolak aktivitas tambang menghadapi tekanan dari aparat dan perusahaan.

Keterlibatan purnawirawan dalam proyek industri semakin menegaskan corak militeristik dalam sektor ekonomi. Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016–2019), beberapa kali mengunjungi kawasan IMIP dan menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut. Perannya dalam proyek strategis ini mencerminkan kedekatan antara elit dengan kepentingan industri, khususnya dalam menjembatani hubungan antara investor, kementerian, dan aparat keamanan.

Konsesi Tambang Nikel seluas 47.000 Ha milik PT Bintang Delapan Mineral, Morowali.
Sumber Foto: bintangdelapan.com





Pangdam XIII/Mdk, Mayjen TNI Legowo W.R. Jamiko, Pastikan Keamanan Kawasan IMIP, Morowali, Sulteng.
Sumber Foto: kailipost.com.

Ketika Joko Widodo berkuasa, pendekatan ini dilembagakan. Proyek-proyek seperti IMIP dan IWIP ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodam XVI/Pattimura diberi tugas menjaga "stabilitas" kawasan industri nikel.

Di Halmahera Tengah, kunjungan Pangdam ke kawasan IWIP menjadi agenda rutin. Pada Juni 2021, Pangdam XVI/Pattimura saat itu, Mayjen Jeffry Apoly Rahawarin, meletakkan batu pertama pembangunan Kompi BS Rem 152/Baabullah di Desa Gemaf. Tiga tahun kemudian, penggantinya, Mayjen Putranto Gatot Sri Handoyo, kembali mengunjungi kawasan industri tersebut. Kunjungan militer berlangsung hanya beberapa pekan setelah Masyarakat Adat memblokir jalan Trans Weda sebagai bentuk protes atas penggusuran wilayah adat.

Pada akhir 2022, situasi memanas. Ketika Masyarakat Adat Halmahera Timur menolak ekspansi tambang. Beberapa Masyarakat Adat ditangkap. Proses dialog tidak dilakukan. TNI dan Polisi mengambil alih situasi. Perusahaan tetap beroperasi.

Situasi semacam ini sudah berlangsung sejak Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Dalam Strategi Pertahanan Negara 2020–2024, TNI ditugaskan mengamankan pembangunan nasional, termasuk proyek berbasis sumber daya alam. Di bawah kendalinya, konsep "keamanan investasi" dilembagakan ke dalam kebijakan pertahanan.

Saat Prabowo akhirnya menjabat sebagai Presiden, rencana strategis 2025 yang disusun Kementerian Pertahanan menjadi lebih ambisius. Dua Kodam baru dirancang di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Jika rencana ini berjalan, aparat bersenjata akan menjadi bagian permanen dalam pengamanan kawasan tambang.

Bagi Masyarakat Adat, kehadiran militer bukan simbol keamanan, melainkan ancaman. Aparat hadir bersama manajemen perusahaan dalam proses pengukuran, pembukaan lahan, hingga pemadaman protes. Negara tidak berposisi sebagai pelindung Masyarakat Adat, melainkan sebagai penjaga investasi.



Krisis Lingkungan dan Sosial yang Terstruktur

Megaproyek ini dibangun tanpa mekanisme pengawasan publik dan pelibatan Masyarakat Adat terdampak. Lebih dari 27.900 hektare hutan hilang sejak 2021 (FWI, 2023). Sungai tercemar. Air tak bisa diminum. Hutan adat rusak permanen. Kedaulatan pangan lokal runtuh, dan jaringan pengetahuan tradisional ikut hilang.

Kesehatan memburuk. Di Halmahera, kasus ISPA melonjak dari 434 kasus pada 2020 menjadi 10.579 kasus pada 2023 (Puskesmas Lelilef, 2024). Debu dari smelter dan PLTU menjadi penyebab utama. Kandungan kromium, arsen, dan merkuri melampaui ambang batas (laporan WALHI Maluku Utara dan AEER, 2023). Sebanyak 22 orang memiliki kadar merkuri melebihi standar WHO. Tidak ada kompensasi, pemeriksaan berkala, pengobatan gratis, atau pendampingan medis.

Di sekitar IWIP, populasi melonjak dari 59 ribu jiwa (2022) menjadi 97 ribu jiwa (2023) (BPS Halteng, 2023). Di Morowali, lebih dari 80 ribu buruh dari Tiongkok dan luar Sulawesi datang (DetikFinance, 2024). Tekanan terhadap ruang hidup meningkat. Bahasa lokal mulai jarang dipakai. Anak-anak tidak lagi belajar bahasa ibu. Upacara adat tahunan terhenti.

Protes dianggap mengganggu stabilitas industri, dan para tokoh adat yang bersuara dikucilkan. Masyarakat Adat kehilangan kontrol atas ruang hidup, ekonomi lokal, bahkan narasi budayanya sendiri.

Sementara, status PSN memperkuat posisi industri. Prosedur perizinan dipercepat, audit lingkungan tidak independen, dan hukum dipakai untuk membungkam. Proyek ini dijual sebagai bagian dari ekonomi hijau, tapi praktiknya tetap eksploitatif.

*Aktivitas Tambang Nikel Cemari Sungai Ake Sangaji, Maba.
Sumber Foto: Chris Balseran / Mongabay Indonesia*





Aksi blokir jalan oleh Perempuan Adat Hoana Wangaeke Minamin Saolat menolak ekspansi pertambangan nikel oleh PT WBN & PT IWIP.
Sumber Foto: Chris Balseran / Mongabay Indonesia



Pembangunan yang Melemahkan Masyarakat Adat

Pembangunan yang diklaim demi kesejahteraan justru merampas tanah dan menyingkirkan Masyarakat Adat. Negara lebih memilih bermitra dengan korporasi ketimbang melindungi rakyat. Pembangunan dijalankan dengan logika pengusuran.

Kerusakan lingkungan dan konflik sosial menunjukkan bahwa pengerahan aparat memperburuk relasi negara dengan Masyarakat Adat. Proyek yang dijalankan tanpa transparansi bukan sekadar kegagalan implementasi, tapi gejala dari model pembangunan yang timpang: memprioritaskan investasi, mengabaikan keadilan.

Yang mendesak saat ini bukan semata perbaikan prosedural, melainkan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk menghentikan pola pembangunan yang mengorbankan Masyarakat Adat demi kepentingan industri. Negara harus berhenti menjadi fasilitator akumulasi kapital dan kembali menjalankan fungsi utamanya: melindungi Masyarakat Adat.

Semua bentuk pengerahan aparat untuk mengamankan investasi harus dievaluasi secara menyeluruh. Lembaga negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Ombudsman perlu bertindak sebagai pengawas aktif—bukan sekadar pelengkap administratif—dalam memastikan pemulihan dan penegakan keadilan di wilayah adat.

Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) Masyarakat Adat harus dipastikan, yaitu dengan menjamin hak untuk didengarkan (*right to be heard*), dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan mendapat penjelasan atas keputusan yang diambil (*right to be explained*). Tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat, pembangunan berkelanjutan akan jadi jargon belaka.



PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !

Menguak Rencana Food Estate di Merauke: Dari Militerisasi hingga Penggusuran Masyarakat Adat

Kawasan hutan yang dibuka untuk program food estate di Kampung Senegi, Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto: Dokumentasi LBH Pos Merauke

Oleh: Ahmad Thariq,
Islam Bergerak &
Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan
Sumber Daya Alam (FNKSDA)

Romanus Moiwend (30) berdiri menghadang ekskavator. Ia meminta pengendara untuk berhenti. *"Biarkan kita bicarakan dulu dengan keluarga."* Kemudian puluhan tentara datang dari hutan menuju ke arah Romanus. Mereka beratribut lengkap. Romanus memohon agar ekskavator dihentikan, tetapi tentara berkeras. *"Tanah ini milik pemerintah,"* ujar tentara. *"Kamu tidak boleh menghalangi."*

Cerita Romanus Moiwend adalah gambaran riil proyek food estate dua juta hektare rezim Prabowo di Merauke. Investigasi Gecko Project (*Fear and Raiders in Papua*) secara mendetail mengungkap realitas ketakutan seiring dengan masifnya pengarahan militer demi percepatan dan pemulus proyek food estate tersebut. Desa-desanya mendadak berubah seakan menjadi medan perang. Intimidasi terjadi sehari-hari di tengah kepungan tentara yang rutin berpatroli.

Aparat militer bahkan merekam dan membagikan aktivitas mereka dalam proyek tersebut lewat media sosial TikTok. Terlihat bagaimana mereka melakukan penghancuran hutan dengan mengendarai ekskavator sambil menenteng bedil, berpatroli keliling desa, hutan, dan sungai. *"Ini seperti mimpi buruk (horor) bagi kami,"* ungkap Alfeus Mambes, Masyarakat Adat dari Desa Wogekel. *"Kami tidak bisa bicara menuntut hak kami. Banyak yang ingin bersuara, tapi tak ada yang mendukung karena takut dengan aparat."*

Pelibatan militer secara masif dalam proyek *food estate* tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, hal ini termasuk dalam rencana besar rezim Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan. Sejak awal memimpin, Prabowo sudah menunjukkan geliat politiknya yang memperluas dan memperkuat kekuatan militeristik—mulai dari revisi UU TNI yang memperluas jabatan militer di sipil, hingga rencana pembangunan seratus batalyon baru untuk memuluskan proyek pembangunan dan swasembada pangan. Militer adalah motor dan kekuatan andalan rezim Prabowo-Gibran.

Dalam PSN *food estate* di Merauke, TNI tak hanya bertugas menjaga, melainkan juga aktif terlibat dalam melakukan kontrol dan eksekusi. Peran signifikan tentara dalam proyek pembangunan, terkhusus *food estate*, menimbulkan kecurigaan dan ketakutan. Ini menunjukkan supremasi sipil yang semakin dilemahkan dan watak pembangunan yang berbasis politik teror dan senjata—terlebih dalam konteks Papua, di mana militerisme dan pelanggaran HAM sangat sering terjadi, menyiksa atau bahkan membunuh orang Papua secara sewenang-wenang dengan label “KKB” atau “OPM”.

***Food estate* Dua Juta Hektare dalam Pusaran Kepentingan Oligarki**

Kepentingan kroni Prabowo dan Jokowi sangat kentara dalam proyek *food estate* Merauke. Target ambisius dua juta hektare untuk bioetanol (tebu) dan cetak sawah digadang-gadang akan menjadi proyek deforestasi terbesar di dunia.

Tercatat nama-nama seperti Haji Isam (Samsudin Arsyad) dan sepuluh konglomerasi bisnis yang akan terlibat dalam proyek ini. Haji Isam bukan nama asing dalam pusaran oligarki republik ini. Ia dikenal sebagai raja batu bara dan sawit di Kalimantan Selatan. PT Jhonlin Group, perusahaan milik Isam, adalah mega korporasi yang memonopoli bisnis CPO skala besar. Isam juga dikenal dekat dengan klik-klik elite politik. Ia merupakan salah satu pebisnis yang mendukung Jokowi-Amin dalam kontestasi politik 2019, dan tercatat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional mereka. Tak berhenti di situ, Isam diduga memasukkan orang-orang dekatnya ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, termasuk sepupunya, Amran Sulaiman.

Hutan yang dibuka untuk food estate di Merauke dengan pengawalan tentara bersenjata.
Sumber Foto: Istimewa / Gecko Project





Dalam proyek *food estate*, keterlibatan Isam sangat mencolok. Ia mengerahkan puluhan hingga ratusan unit ekskavator ke Merauke untuk membuka kawasan hutan. Ekskavator merek Sany tersebut digunakan untuk memuluskan agenda cetak sawah satu juta hektare di Merauke, yang juga bagian dari total dua juta hektare proyek *food estate* (cetak sawah dan tebu).

Tercatat nama-nama seperti PT Global Papua Abadi, PT Andalan Manis Nusantara, PT Semesta Gula Nusantara, PT Dutamas Resources Internasional, PT Borneo Citra Persada, PT Global Papua Makmur, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Agrindo Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara, termasuk dalam proyek tersebut. Lima perusahaan di antaranya terafiliasi dengan First Resources (Global Papua Abadi, Andalan Manis Nusantara, Semesta Gula Nusantara, Borneo Citra Persada, dan Dutamas Resources Internasional). First Resources adalah korporasi sawit milik Martias Fangiono, salah satu "raja sawit" yang juga pernah tersandung skandal korupsi pembukaan lahan.

Amran Sulaiman, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian, juga memiliki peran krusial dalam melapangkan jalan proyek *food estate* di Merauke. Amran, yang merupakan sepupu Haji Isam, menunjukkan geliat politik untuk memuluskan proyek dua juta hektare rezim Prabowo. Ia bahkan tak segan mengeluarkan pernyataan intimidatif di hadapan publik yang mengkritisi rencana swasembada pangan. Pernyataannya yang melabeli pakar sebagai "musuh negara" menunjukkan tendensi politik kepentingan yang kental dan gestur otoritarian yang mengancam kebebasan sipil.

Nasib Masyarakat Adat Papua: Jadi Penonton, Diteror, dan Digusur di Tanah Sendiri

Siapa yang akan dikorbankan dalam proyek ini? Jawabannya jelas: Masyarakat Adat Papua. Suku Yeinan, Maklew, Kimahima, Malind dengan tegas menunjukkan penolakan terhadap PSN dua juta hektar ini. Diperkirakan 50.000 Masyarakat Adat di 40 kampung akan terdampak megaprojek tersebut.

PSN cetak sawah di Merauke dieksekusi secara brutal, tanpa sosialisasi. Masyarakat Adat dipaksa menerima proyek tanpa konsultasi dan persetujuan. Buldozer dan ekskavator menerobos wilayah adat, menghancurkan hutan, dusun, dan rawa. Aparat gabungan TNI/Polri turut mengawal alat-alat berat tersebut dalam proses penghancuran hutan di Wanam, Distrik Ilwabay, Kabupaten Merauke. Masyarakat Adat membuat tanda larangan, tetapi ekskavator merobohkan dan menabrak sasi adat.



Protes Masyarakat Adat Suku Yei menolak *food estate* di wilayah adat mereka, di Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto: Pusaka Bentala Rakyat



Hal yang sama terjadi di Distrik Okaba dan Tubang, lokasi beroperasinya PSN. Masyarakat Adat mengaku tidak mendapat sosialisasi. Terkejut dengan kehadiran perusahaan yang datang tiba-tiba, seluruh Masyarakat Adat langsung mengadakan pertemuan dan menolak proyek tersebut. TNI juga diduga melakukan intimidasi terhadap Masyarakat Adat yang menolak. Enam tentara dikabarkan mencari mereka yang menolak. Masyarakat curiga TNI sedang melakukan teror psikologis dan berencana melakukan penangkapan atau penganiayaan.

Namun, Masyarakat Adat kompak menunjukkan perlawanan. Mama Yasinta Moiwend, perempuan Papua dari suku Marind, bersama kawan-kawan Masyarakat Adat Papua datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek *food estate* yang memangsa ruang hidup dan tanah adat mereka.

"Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak, habis. Burung-burung di udara, bahkan binatang di bawah tanah digusur. Kami mau makan apa? Anggap saja kami sudah mati," kata Mama Yasinta dalam orasinya dengan nada berapi-api di hadapan peserta Kamisan Jakarta.

Perjuangan Mama Yasinta dan Masyarakat Adat Papua lainnya adalah potret nyata bagaimana proyek *food estate* yang diklaim sebagai solusi ketahanan pangan dan energi, justru menjadi malapetaka bagi kedaulatan atas wilayah adat. Semua fakta penindasan yang telah dijabarkan sebelumnya akhirnya mengharuskan kita bertanya: *food estate*, solusi atau hipokrisi?

***Food estate* Merauke: Solusi Iklim atau Hipokrisi?**

Rezim Prabowo mengklaim bahwa proyek *food estate* di Merauke bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan menyediakan solusi iklim melalui energi terbarukan (bioetanol). Cetak sawah disebut sebagai pilar ketahanan pangan, sedangkan tanaman tebu sebagai bahan baku bioenergi.

Klaim pemerintah sekilas terdengar menjanjikan, namun kebenarannya perlu diuji secara kritis. Bagaimana mungkin berbicara soal solusi iklim sementara pada saat yang sama merampas kedaulatan tanah dan hutan adat serta menggusur Masyarakat Adat melalui teror militeristik? Solusi iklim seharusnya membuang jauh paradigma pembangunan top-down yang sarat kekerasan ala Orde Baru, dan bergerak menuju pembangunan demokratis yang melibatkan partisipasi aktif Masyarakat Adat.

Sebab, Masyarakat Adat selalu berada di garda depan dalam menghadapi krisis iklim, yang memiliki pengetahuan penting tentang relasi ekologis dan sistem pangan lokal berkelanjutan—seperti sagu dan pengelolaan hutan adat yang kaya keanekaragaman hayati.



*Yasinta Moiwend, warga Suku Marind Kondo Digul, Merauke, saat unjuk rasa Kamisan di depan kompleks Istana, Jakarta.
Sumber Foto: BBC Indonesia*



Pelibatan Masyarakat Adat juga merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak demokratis warga negara. Masyarakat Adat bukan "pengganggu" yang harus disingkirkan atas nama pembangunan, pertumbuhan ekonomi, atau ketahanan pangan dan energi terbarukan. Solusi iklim tanpa partisipasi Masyarakat Adat adalah solusi palsu. Perubahan iklim tak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, termasuk penghormatan terhadap eksistensi dan hak-hak Masyarakat Adat.

Model *food estate* yang monokultur, destruktif, dan militeristik sama sekali tidak mencerminkan semangat solusi yang adil secara sosial dan ekologis. Sebaliknya, ini justru proyek konglomerasi ekstraktif yang haus akan kapital. Pendekatan militeristik adalah bentuk nyata teror di Papua—siapa pun yang bersuara, berhadapan dengan senjata.

Tidak ada solusi iklim atau ketahanan pangan dalam proyek *food estate* Prabowo. Ketika hutan sebagai sumber pangan dihancurkan dan hak Masyarakat Adat dilanggar, maka tidak ada komitmen nyata terhadap mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah sistemik yang menuntut kolaborasi yang setara dan adil.

Perubahan iklim harus dijawab dengan membongkar paradigma pembangunan yang otoriter dan kapitalistik, menuju model yang menekankan keadilan sosio-ekologis dan partisipatoris. Hal yang tidak tercermin dalam *food estate* Merauke yang justru menjadikan politik teror sebagai instrumen utama. Selama model ini dipertahankan, solusi iklim pemerintah tak lebih dari tipu muslihat.

*Panglima TNI Agus Subiyanto, meninjau lahan Food Estate Merauke, Papua Selatan, Rabu (22 Mei 2024).
Sumber : Foto- Puspen TNI-Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi*





Menjaga Ibu Bumi, Menggugat Ibu Kota Perlawanan Perempuan Adat Kaltim atas IKN

Oleh: Isnah Ayunda
Jurnalis Masyarakat Adat Kalimantan Timur

Pemerintah membangun Ibu Kota Negara dengan gegap gempita, membentangkan jalan tol dan menancapkan tiang pancang di jantung wilayah adat. Tapi bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Timur, pembangunan ini adalah luka panjang yang merobek sejarah, identitas, dan tubuh-tubuh yang selama ini menjaga hutan dan sungai. Di antara suara mesin dan janji investasi, ada suara-suara yang berusaha diredam: suara Perempuan Adat Suku Balik yang terus merawat warisan leluhur, menjaga pengetahuan, dan mempertahankan ruang hidup dari gempuran kekuasaan. Inilah kisah mereka—kisah orang-orang yang melawan, mempertahankan ruang hidup yang merupakan warisan bagi generasi mendatang.

I. Ketika Alam Tak Lagi Bicara

Dari tahun ke tahun, perubahan terus terjadi. Namun kita masih dapat mendengar para tetua membagikan kisah bagaimana Masyarakat Adat mengakses sumber daya alam tanpa merusak hutan dan habitat di wilayah adat. Leluhur menjaga hutan agar tetap lestari demi generasi mendatang. Melalui pengetahuan tradisional, Masyarakat Adat bahkan mampu membaca tanda-tanda bencana. Salah satunya adalah dentuman dari hulu Sungai Sepaku—suara seperti ledakan yang diyakini sebagai peringatan alam dari leluhur. Kini, tanda-tanda itu nyaris menghilang. Para tetua percaya hal ini terjadi karena ritual penghormatan kepada leluhur tak lagi dilakukan. Sayangnya, banyak tempat ritual telah hancur akibat pembangunan yang tidak melibatkan dan justru menyingkirkan Masyarakat Adat.

*Baliho Penolakan Relokasi yang dipasang di Sepaku, PPU.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Masyarakat Adat Suku Balik menjaga alam dengan penuh penghormatan sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu wujudnya adalah pelestarian situs ritual Bakou Lemit di wilayah adat Paser Balik Pemaluan. Bakou Lemit adalah satu-satunya pohon bakau kuning di tengah hamparan mangrove yang diyakini sakral. Konon, Tam Lempai—pemimpin adat laki-laki—pernah menjemur *lawung* (kain pengikat kepala) kuning di pohon itu. Hingga kini, *Bakou Lemit* dipercaya sebagai penghubung antara Masyarakat Adat dan leluhur. Karena itulah, Teluk Balikpapan dijaga sebagai bagian dari kepercayaan adat. Setiap tempat diyakini memiliki keterikatan spiritual. Jika tempat yang berkaitan dengan leluhur dirusak, maka malapetaka akan datang menimpa.

II. IKN Datang, Wilayah Adat Menghilang

Sebelum rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Masyarakat Adat Benou Balik Sepaku, Paser Balik Pemaluan, Paser Maridan, dan Paser Mentawer hidup tanpa akses transportasi yang memadai. Satu-satunya jalur adalah jalan raya Penajam–Samboja Kilometer 36 yang kondisinya pun buruk. Meski nyaris terisolasi, wilayah adat relatif aman dari ancaman kerusakan. Jauh sebelum IKN, kerusakan lingkungan sudah terjadi akibat program transmigrasi, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit yang menghancurkan sebagian besar wilayah adat serta mengganggu kehidupan Masyarakat Adat.

Pada 26 Agustus 2019, pemerintah mengumumkan pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan inti pembangunan berada tepat di wilayah adat Benou Balik Sepaku dan Paser Balik Pemaluan. Pemerintah bergerak cepat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tanpa melibatkan Masyarakat Adat dalam proses pembahasannya.

Bakou Lemit, Kawasan sakral bagi suku Balik yang ditumbuhi Pohon Bakau yang daunnya berwarna kuning, terletak di Muara Sungai Terunen. Sumber Foto: Dokumentasi Jubi



Seolah menyambut baik niat pemerintah pusat, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, melalui televisi dan media sosial memberi pernyataan yang mengagetkan. Isran mengklaim bahwa masyarakat senang dengan pembangunan IKN dan menyatakan tanah yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan adalah milik negara. Di saat yang sama, ia mengakui bahwa Masyarakat Adat tidak pernah diajak bicara. Padahal, Masyarakat Adat Suku Balik telah mendiami wilayah ini jauh sebelum PT. IHM (ITCI Hutani Manunggal) berdiri, bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Tinggalan sejarah dan situs adat membuktikannya. Kini, banyak pemukiman, situs ritual, dan kebun Masyarakat Adat yang terdampak. Pohon Bakou Lemit—situs sakral Suku Balik—terhimpit oleh dermaga pengangkut kayu eucalyptus dan logistik IKN.

Pembangunan IKN berlangsung terburu-buru, bak legenda Roro Jonggrang yang memaksakan segalanya selesai dalam semalam. Jalan tol, jembatan, dan bangunan menghancurkan gunung, sungai, dan ruang hidup lainnya. Transmigrasi dan buruh dari luar Kalimantan datang dalam jumlah besar, mengubah lanskap sosial. Relasi antara manusia, alam, dan leluhur terancam hilang. Padahal selama ini, Suku Balik hidup harmonis bersama suku lain dan menjaga alam melalui kearifan adat yang diwariskan turun-temurun.

III. Perempuan dalam Bayang-bayang Proyek Raksasa

Suku Balik mengenal kepemimpinan perempuan melalui sosok Ten Sopek—sebuah panggilan kehormatan bagi perempuan yang dituakan atau dihormati. Model kepemimpinan ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pengurus rumah tangga, tetapi juga pemimpin. Dalam adat Suku Balik, perempuan dihormati, dan alam—*danum* (air), *tana* (tanah), serta *lawang* (hutan)—dipandang seperti ibu yang menyusui: memberi hidup, melindungi, dan merawat. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai penjaga utama wilayah adat.



Istana Presiden di IKN dari kejauhan saat malam hari.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Sebagai penjaga pengetahuan dan keseimbangan ekologi, Perempuan Adat mengenali tumbuhan, memahami kegunaannya, serta mempraktikkan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Namun kini, tanah sebagai identitas dan warisan leluhur terus tergeser. Ketika ruang hidup dilepas tanpa kejelasan, Perempuan Adat kehilangan akar sejarah dan jati diri. Perubahan ini bukan hanya merusak bentang alam, tetapi juga meretakan relasi sosial antar Perempuan Adat yang sebelumnya terjalin melalui ritual, gotong royong, dan praktik budaya bersama.

Situasi ini diperparah oleh intimidasi aparat negara. Pertemuan-pertemuan masyarakat diawasi secara diam-diam oleh polisi dan TNI yang menyamar dan mencari informasi tentang gerakan advokasi Masyarakat Adat. Bahkan, intimidasi dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat. Bapak Derry (nama disamarkan), seorang tokoh adat, pernah ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari AMAN dan diminta mengirim absensi kegiatan. Setelah ditelusuri, nomor tersebut ternyata milik anggota TNI berpangkat Sersan Dua.

Hal serupa dialami Ibu Anggrek dan Ibu Tini (nama disamarkan). Ibu Anggrek dimintai alamat pertemuan oleh polisi saat mengikuti agenda PEREMPUAN AMAN, sementara Ibu Tini merasa diawasi oleh intel yang berkeliaran di depan rumahnya setelah menerima kunjungan wartawan asing. Tekanan ini menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi perempuan yang aktif dalam gerakan sosial dan budaya Masyarakat Adat.

Ibu Syamsiah, misalnya, pernah menyebarkan petisi penolakan pembangunan Bendungan Intake Sepaku. Meski sempat ditertawakan oleh masyarakat yang pro-pembangunan, Ibu Syamsiah bersama suami dan salah seorang rekannya— Ibu Jakiyah—terus membangun kesadaran kolektif di kalangan perempuan. Dengan dukungan anak muda serta koalisi organisasi masyarakat sipil Kalimantan Timur, mereka melakukan aksi penolakan relokasi. Tekanan ini mendorong pemerintah membatalkan relokasi, meskipun keputusan tersebut tetap menyimpan ancaman karena tidak disertai jaminan hukum.

Di sisi lain, seiring datangnya gelombang pekerja, praktik prostitusi menjadi terbuka dan warung remang-remang bermunculan di sekitar wilayah adat. Elisnawati, Perempuan Adat dari Balik Pemuatan, pernah mengusir warung semacam itu dari wilayah adatnya. Ia, yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT, justru diintimidasi dan dianggap mencampuri urusan yang bukan kewenangannya. Padahal, tindakannya bertujuan melindungi komunitas adat dari perubahan sosial yang mendadak, termasuk potensi penyebaran penyakit seperti HIV dan infeksi menular seksual lainnya.



*Bendungan Intake Sepaku menutup akses warga Sepaku atas air Sungai Sepaku.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



Praktik prostitusi yang semakin marak ini juga dirasakan Ibu Mawar (nama samaran). Ia mengaku banyak perempuan asing kerap mendatangi pekerja di lokasi pembangunan, bahkan menghampiri warung kopi yang biasanya menjadi tempat berkumpul. Selain itu, warung Lapo Tuak menjamur di sepanjang jalan menuju IKN. Meskipun disebut menjual tuak, banyak yang meyakini terdapat aktivitas lain yang meresahkan. Dampak lainnya, Kanjeng (nama disamarkan) yang hanya membuka warung kopi turut mengalami pelecehan. Ia dianggap menjual diri hanya karena ikut berjualan kopi, padahal kebunnya telah digusur akibat proyek IKN dan HTI. Niatnya untuk mencari penghidupan justru ditafsir secara negatif, membuatnya hidup dalam rasa malu dan ketakutan.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari eksploitasi ruang yang berjalan seiring dengan eksploitasi tubuh. Vandana Shiva dalam *Staying Alive: Women, Ecology and Development* (1989) menyatakan bahwa tubuh perempuan dan alam kerap diposisikan sebagai objek eksploitasi oleh sistem patriarki dan kapitalisme. Dalam konteks pembangunan IKN dan Intake Sepaku, eksploitasi ini berlangsung dalam berbagai lapis: Perempuan Adat kehilangan sungai sebagai ruang spiritual, sosial, dan produktif—tempat mencuci, mencari ikan dan kerang, serta mengambil nipah untuk atap rumah. Sungai bukan sekadar sumber daya, tetapi bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup.

Namun yang juga perlu disadari, tubuh perempuan yang dikomodifikasi dalam praktik prostitusi pun merupakan bagian dari mata rantai eksploitasi yang sama. Mereka sering kali datang dari kondisi ekonomi sulit, dimobilisasi oleh jaringan perantara, dan masuk ke ruang-ruang proyek sebagai pelengkap arus maskulin pembangunan. Dalam logika kapitalisme ekstraktif, tubuh perempuan menjadi komoditas yang hadir mengikuti laju pembangunan, bukan sebagai subjek berdaulat. Tidak ada perempuan yang dengan suka cita memilih jalan hidup sebagai pelacur—pilihan itu lahir dari kemiskinan struktural. Maka, ketika prostitusi merangsek masuk ke wilayah adat, yang tereksplorasi bukan hanya ruang hidup Masyarakat Adat, tetapi juga perempuan yang masuk ke dalam lingkaran kekerasan sistemik tanpa perlindungan.



*Kebun Akasia & Eukaliptus (HTI)
Sepanjang Jalan Sepaku-Balikpapan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



Maria Mies dalam *Patriarchy and Accumulation on a World Scale* (1986) juga menyoroti bahwa pembangunan modern mencabut perempuan dari proses pengambilan keputusan dan menghapus pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Intake Sepaku dibangun tanpa melibatkan perempuan—padahal tokoh-tokoh seperti Elisnawati, Ibu Syamsiah, dan Ibu Jakiyah telah lama berperan dalam pelestarian budaya dan penguatan komunitas. Kritik Mies menjadi nyata: pembangunan tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga membungkam suara perempuan sebagai penjaga bumi dan ruang hidupnya.

IV. Sekolah Adat: Melawan Lupa dan Penggusuran

Di tengah derasnya arus penghancuran, Perempuan Adat terus menjaga ruang-ruang belajar kolektif melalui sanggar tari dan sekolah adat. Di Benou Balik Sepaku dan Paser Balik Pemaluan, perempuan mentransmisikan pengetahuan budaya dari generasi ke generasi. Ibu Jakiyah dan Ibu Syamsiah, misalnya, mengajarkan anak-anak menari ronggeng Balik. Elisnawati mengelola sanggar tari sekaligus melestarikan *kuntaw*—seni bela diri tradisi. Para pengajar ini adalah orang tua dan tokoh adat yang terus menghidupkan tradisi melalui tarian, musik, dan ilmu pengobatan dari hutan.

Bagi Masyarakat Adat, mewariskan pengetahuan budaya bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi bentuk nyata perlawanan: bahwa Masyarakat Adat masih ada, hidup, dan merawat warisan leluhur di tengah gempuran pembangunan.

Sekolah Adat Balik Sepaku menjadi ruang belajar yang terbuka bagi anak-anak, pemuda, dan perempuan adat dari berbagai latar. Dipimpin oleh Harianto, sekolah ini hadir sebagai tempat aman dan merdeka untuk menggali dan mempraktikkan pengetahuan: dari ritual, cara berburu, membuat obat tradisional, hingga mengenali tumbuhan hutan. Proses belajar dilakukan secara kolektif dan lintas identitas, mencerminkan keterbukaan terhadap perubahan tanpa kehilangan akar.



*Peserta didik Sekolah Adat sedang berlatih menarikan Tari Ronggeng Balik.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



"Sekolah adat ini bukan reaksi terhadap IKN. Ia sudah ada jauh sebelumnya. Justru IKN membuat kami kehilangan banyak pengetahuan karena kami dipecah-belah oleh janji-janji kesejahteraan yang semu." tegas Harianto.

Melalui sekolah adat, tumbuh kesadaran kritis bahwa wilayah adat bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya. Pengetahuan yang diwariskan para tetua menjadi alat perjuangan: melawan stigma kepunahan, menunjukkan bahwa Suku Balik masih ada, dan akan terus ada.

Perjuangan ini tentu tak lepas dari tekanan struktural. Upaya mempertahankan ruang hidup kerap dihadapkan pada kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam berbagai regulasi yang sektoral dan tumpang tindih terkait kehutanan, lingkungan hidup, dan pembangunan. Instrumen hukum yang semestinya melindungi justru kerap dipakai untuk membungkam Masyarakat Adat yang menjaga hutan dan mempertahankan wilayah adat. Hukum berubah menjadi alat represi, bukan perlindungan. Kondisi ini menegaskan gentingnya percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat (UU MA) sebagai payung hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan nyata.

Pada akhirnya, tubuh yang menolak tunduk pada ketidakadilan akan terus bergerak. Perempuan Adat mewariskan pengetahuan dalam tiap denyut kehidupan, menjadikannya kekuatan yang hidup dan mengakar. Sekolah adat menjadi benteng terakhir—tempat bertahan, belajar, dan menyusun kembali jejak yang nyaris terhapus. Di tengah ancaman penggusuran, suara perlawanan tak pernah padam: menuntut pengakuan, perlindungan, dan keadilan agar warisan ini tetap hidup dalam perjuangan bersama.



*Harianto, Salah Satu pengajar Sekolah Adat Balik yang gigih berjuang mempertahankan wilayah Adat Balik Sepaku dari Proyek IKN.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Pendidikan Wun: Antara Pewarisan Nilai, Hak Masyarakat Adat, dan Ketahanan Budaya

Oleh: **Silas O. Kalami, S.Sos., M.A.**
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi

Modernisasi yang menawarkan pendidikan sistemik dan institusional telah membawa perubahan sosial, terutama pada pola pikir dan perilaku masyarakat. Namun, generasi muda kian tercerabut dari akar budayanya sendiri sehingga mengalami kekosongan kultural. Dalam kekosongan ini, mereka cenderung mencari pegangan identitas melalui adopsi budaya asing, khususnya dari dunia Arab dan Eropa. Gejala ini mencerminkan bentuk dominasi budaya yang menggeser budaya lokal dari ruang hidupnya. Oleh karena itu, gerakan kembali ke budaya (*back to culture*) menjadi penting agar kita dapat merdeka di negeri sendiri, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebab budaya adalah fondasi yang memengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia.

Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong secara umum dikenal sebagai Masyarakat Adat Moi atau suku besar Moi, yang terbagi ke dalam delapan sub-suku: Moi Kelim, Moi Sigin, Moi Klabra, Moi Salkma, Moi Lemas, Moi Maya, Abun Taat, dan Abun Jii. Setiap sub-suku memiliki ciri khas yang unik, termasuk perbedaan bahasa dan dialek, makanan pokok, serta istilah yang digunakan untuk menyebut pendidikan adat. Misalnya, Moi Kelim dan Moi Sigin menyebut pendidikan adat sebagai *Kambik*, sementara Moi Klabra, Moi Salkma, Abun Taat, dan Abun Jii menyebutnya *Wun*.



*Para Pendidik Sekolah Adat WUN menari bersama.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Pendidikan adat *Wun* hanya dikenal di wilayah adat Doberay, yaitu wilayah yang dihuni suku-suku di Sorong Raya dan Manokwari Raya. Penyebarannya yang terbatas ini disebabkan oleh faktor geografis yang relatif terisolasi serta kekuatan sistem sosial adat yang masih dipertahankan oleh Masyarakat Adat di wilayah tersebut. Ciri khas lain dari wilayah ini adalah tari tradisional yang disebut *Srar*. Pendidikan *Wun* bukan sekadar pelatihan, melainkan sebuah proses pembentukan karakter. *Wun* berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya serta norma adat dalam kehidupan Masyarakat Adat. Di dalamnya terjadi proses transfer pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda.

Setelah menyelesaikan pendidikan adat, para siswa akan mendapatkan nama adat seperti *Findoi*, *Mowu*, *Untelem*, *Tilimai*, atau *Swerikbu*. Nama-nama ini sarat makna dan hanya dapat dimengerti sepenuhnya oleh para peserta didik. Mereka yang telah lulus dari pendidikan adat dikategorikan sebagai “pria berwibawa”. Dalam bahasa Moi Kelim dan Moi Sigin, pria dewasa yang telah mengikuti pendidikan adat disebut *nedala*, sementara yang belum mengikuti disebut *nelagi*, yang secara harfiah berarti perempuan atau anak-anak—belum dewasa secara sosial.

Seorang *nedala* mengenakan penanda adat pada leher atau tangannya sebagai simbol status, yang biasanya berupa kalung dari akar rotan, gelang kayu pahatan, atau manik-manik khas yang diwariskan turun-temurun sebagai simbol tanggung jawab sosial. *Nedala* memiliki hak untuk bertindak sebagai hakim adat dan penasihat dalam urusan adat. Karena pentingnya posisi sosial seorang *nedala*, nama dan gelar yang diberikan harus dijaga dengan sikap dan perilaku yang selaras dengan prinsip dan norma-norma adat. Bila terjadi pelanggaran, sanksi adat akan dijatuhkan.

Dalam konteks ini, pendidikan adat menjadi penting di tengah dominasi sistem pendidikan modern. *Wun* menghasilkan manusia yang kaya akan kearifan budaya, sekaligus mampu berkontribusi pada pembangunan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Namun, sejarah panjang menunjukkan bahwa pendidikan adat seperti *Wun* pernah hampir musnah. Penyingkiran sistem ini menyebabkan terputusnya transmisi pengetahuan lokal, seperti keterampilan membaca tanda alam, hukum tanah ulayat, serta ritual yang mengatur keseimbangan antara manusia dan alam. Sejak 1964 hingga 2021, pendidikan adat *Wun* tidak diselenggarakan karena munculnya pandangan negatif dari luar terhadap praktik-praktik adat. Di Kalawilis, Distrik Sayosa, praktik pendidikan adat distigma sebagai sesuatu yang kuno, primitif, sesat, bahkan kafir. Label-label ini menjadi alat penghancuran identitas Masyarakat Adat, sekaligus bentuk penjajahan budaya.

Upaya menghidupkan kembali pendidikan *Wun* pun dilakukan oleh para pemangku adat. Pada tahun 2021, *Wun* kembali digelar di Kampung Saluk, Distrik Wemak, oleh beberapa *Nosa* dari sub-suku Moi Salkma dan Moi Klabra. Hasilnya, sebanyak 204 siswa berhasil menyelesaikan masa studi dalam dua tahun empat bulan.

Kebangkitan *Wun* juga tak terlepas dari dukungan kebijakan. Di tingkat internasional, pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat ditegaskan melalui Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disahkan pada 23 September 2007. Indonesia telah meratifikasi prinsip-prinsip ini melalui berbagai regulasi nasional, terutama pasca reformasi 1998.

Di tingkat nasional dan lokal, pengakuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi. Secara khusus, Pasal 18 Perda tersebut menjamin hak Masyarakat Hukum Adat Moi untuk mempraktikkan kepercayaan, upacara ritual, tradisi, adat istiadat, serta pengetahuan tradisional termasuk pendidikan adat dan kekayaan intelektualnya.



Pendidikan adat *Wun* bukan semata pelestarian budaya, melainkan juga strategi memanusiakan manusia. Ia mengandung tujuan yang besar: memantik kesadaran antargenerasi tentang pentingnya pendidikan adat bagi masa kini dan masa depan, menjadi wahana transformasi ilmu dari generasi tua ke muda, menjaga sejarah dan nilai-nilai, melestarikan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menciptakan ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat Adat.

"Wadwe Nha Smut Siwefafe"
Jaga manusia, tanah,
sumber daya alam, budaya,
dan kelembagaan adatnya.

Saat ini, *Wun* tidak hanya berlangsung di Saluk. Pendidikan adat serupa telah diselenggarakan di Luwelala, Distrik Maudus, sejak 2024 dengan 24 siswa, dan tengah berlangsung di Tarsa, Distrik Konhir, dengan *Nosa Blongkasiak* sebagai tuan rumah. Persiapan untuk penyelenggaraan *Wun* juga dilakukan di Kalawilis Pasa.

Di tengah modernisasi, ekspansi industri, dan sistem pendidikan yang mengikis bahasa serta nilai-nilai lokal, Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan dewan adat tingkat distrik terus menjaga nilai-nilai dan warisan budaya agar tetap hidup. Komitmen ini terwujud dalam semboyan: *"Wadwe Nha Smut Siwefafe"* — jaga manusia, tanah, sumber daya alam, budaya, dan kelembagaan adatnya.

*Kelulusan 204 Peserta didik Sekolah Adat WUN, Kampung Saluk, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong, dengan masa studi 2 Tahun 4 Bulan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Kelelondey: Perahu di Kaki Soputan yang Dirusak Dentuman Senjata

Oleh : Hendi
BPAN PKAM Kanonang,
Minahasa, Sulawesi Utara

*Plang Klaim Tanah oleh TNI di Kelelondey
Sumber Foto: Dokumentasi BPAN Sulawesi Utara.*

Kelelondey berada di bawah kaki Gunung Soputan dan Gunung Manimporok, tepat di belakang empat desa: Noongan dan Raringis—yang masing-masing kini telah dimekarkan menjadi tiga desa—serta Ambreng dan Tumaratas, yang telah dimekarkan menjadi dua desa.

Berdasarkan *Buku Sejarah Berdirinya Desa Noongan*, Kelelondey berasal dari bahasa Tontemboan, yang terdiri dari dua kata: *kele*, yang berarti "seperti", dan *londey*, yang berarti "perahu". Disebut demikian karena wilayah yang luasnya sekitar 500 hektare ini, jika dilihat dari ketinggian, tampak menyerupai bentuk perahu. Pada musim hujan, Kelelondey digenangi aliran air dari tiga mata air. Masyarakat Tontemboan menyebutnya dengan istilah *ranotelu*—tiga air.

Dulu Subur Dijaga Leluhur, Kini dikuasai TNI

Para petani Kelelondey telah puluhan tahun hidup dari tanah ini. Namun kini mereka tak berdaya, ketika lahan pertanian mereka diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Enam papan bertuliskan nama-nama satuan pendidikan TNI ditancapkan di atas tanah mereka—seperti "Kebun Mako Rindam", "Kebun Setan", dan "Kebun Dodikjur".

"Ada dua tentara datang, kong bilang, 'Ini kau buang semua orang. Semua kerja nggak usah di sini,'" ujar Welly Manampiring, seorang petani yang pasrah saat lahannya dirampas.

Aktivitas militer berkedok latihan ini dilakukan di kawasan Kelelondey, yang merupakan wilayah Masyarakat Adat Raringis, Noongan, Ambreng, dan Tumaratas. Latihan militer dengan menggunakan bom dimulai pada 6 Februari 2025, dan sejak itu masyarakat terus menyaksikan kepulan asap hitam keabuan menyelimuti langit.



Suara tembakan dan dentuman alat berat memekakkan telinga, membuat tanah bergetar, dan mengagetkan masyarakat. Akibatnya, tanaman seperti *lihat* (singkong), *rica* (cabai), dan *kumentes* (tomat) berguguran sebelum panen. Petani menghadapi risiko gagal panen.

Aktivitas ini juga mengganggu ketenangan masyarakat. Anak-anak di sekolah dasar menjadi takut dan tertekan karena suara baku tembak yang menggema seperti perang. Beberapa lansia mengaku sulit beristirahat karena suara dentuman terdengar hingga ke rumah.

Latihan militer di Kelelondey dikecam banyak pihak, terutama oleh Masyarakat Adat yang menjaga wilayah ini secara turun-temurun. Kelelondey bukanlah medan pertempuran, apalagi sarang teroris yang mengancam negara. Kelelondey adalah tanah subur—sebuah kawasan pertanian hortikultura yang telah lama menopang kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan hingga ke Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur.

Perahu Damai Penjaga Kehidupan

Masyarakat Adat telah lama menjadi penggerak kedaulatan pangan — menjaga tanah dengan kasih dan merawat kehidupan dengan laku yang selaras dengan alam.

Pada akhirnya, tanah Kelelondey bukan sekadar lahan garapan, melainkan wujud kesadaran hidup Masyarakat Adat Minahasa—yang berakar pada tradisi dan tumbuh dalam semangat kolektif. Ia harus dijaga oleh seluruh elemen budaya Minahasa hari ini, sebelum diluluhlantakkan oleh *reges lewo*, angin jahat yang datang merampas dari luar. Kelelondey adalah perahu damai, tempat pengharapan dan kehidupan terus berlayar.



Pemuda Adat Menolak Perampasan Wilayah Adat Kelelondey.
Sumber Foto: Dokumentasi BPAN Sulawesi Utara



Perempuan Adat Punan Tugung Menganyam Pengetahuan, Menenun Kemandirian

Oleh: Sri. T Shuket
PHD PEREMPUAN AMAN Sekatak,
Kalimantan Utara.

Perempuan Adat Punan Tugung memiliki pengetahuan yang luas tentang anyaman rotan, sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keterampilan ini dapat dilihat dari bagaimana Perempuan Adat Punan Tugung mengolah rotan. Dengan tangan yang terampil, Perempuan Adat Punan Tugung menganyam rotan menjadi berbagai bentuk dan desain yang indah serta fungsional.

Proses pembuatan anyaman dimulai dengan mencari rotan yang berkualitas di hutan. Perempuan Adat Punan Tugung memahami jenis-jenis rotan yang baik dan cara memotongnya dengan benar. Setelah itu, mereka membersihkan dan meraut rotan agar siap diolah dan digunakan.

Selanjutnya, mereka mewarnai rotan dengan pewarna alami yang berasal dari daun kayu keranyawing. Pewarna alami ini menghasilkan warna hitam yang kuat dan tidak mudah luntur.

Jenis dan bentuk anyaman yang dihasilkan Perempuan Adat Punan Tugung sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman hidup. Anyaman rotan yang berupa anjat, keraga, uyut, atau dompet, lahir dari ketekunan dan pengetahuan yang dibentuk oleh relasi dengan alam.

Di luar fungsi dan nilai budayanya, keterampilan menganyam juga terus berkembang menjadi sarana adaptasi—baik untuk menjawab kebutuhan praktis maupun untuk merespon dan membuka peluang baru.



*Kelompok Perempuan Adat Punan Tugung sedang menganyam rotan.
Sumber Foto: PEREMPUAN AMAN
Kalimantan Utara.*



Keseharian Perempuan Adat Punan Tugung menunjukkan keterhubungan antara praktik anyaman rotan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam aspek ekonomi, anyaman rotan menjadi sumber pendapatan penting bagi Perempuan Adat Punan Tugung. Mereka memasarkan hasil anyaman melalui berbagai jalur—mulai dari pembeli langsung, jaringan penjual di pasar mingguan, hingga pengepul lokal yang berperan sebagai penghubung ke pasar yang lebih luas.

Dalam aspek sosial, Perempuan Adat Punan Tugung memainkan peran sentral sebagai penghubung antargenerasi. Lewat praktik menganyam, mereka mentransfer pengetahuan ekologis, teknik kerajinan, hingga nilai-nilai kolektif kepada anak-anak dan perempuan muda. Proses ini tidak hanya menjaga tradisi tetap hidup, tetapi juga memperkuat struktur sosial berbasis kekerabatan.

Dalam aspek budaya, anyaman rotan menjadi bagian penting dari identitas Perempuan Adat Punan Tugung. Mereka memiliki kepercayaan bahwa anyaman rotan dapat membawa keberuntungan dan kekuatan spiritual. Walau kini jarang dilakukan, Perempuan Adat Punan Tugung masih mengenali praktik ritual dan upacara khusus yang dahulu menyertai proses menganyam—sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur yang diyakini hadir dalam setiap aspek kehidupan.

Selama lebih dari satu dekade, PEREMPUAN AMAN mendampingi Perempuan Adat Punan Tugung untuk memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pendampingan ini membuka ruang belajar yang memungkinkan Perempuan Adat Punan Tugung menata ulang cara mengelola hasil kerajinan dan memperluas jangkauan pasarnya.

Lewat pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun kini diperkuat dengan strategi pemasaran yang lebih terbuka. Anyaman rotan yang dulunya hanya dijual di lingkaran terbatas, sekarang mulai dikenal di berbagai tempat, termasuk lewat platform digital.

Kini, Perempuan Adat Punan Tugung menapaki peran baru dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Mengelola usaha, mengambil keputusan penting, dan menentukan nilai hasil kerja sendiri. Dari pengrajin, mereka tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri—tanpa melepaskan akar tradisi yang mereka jaga.

Ini bukan hanya tentang keberhasilan ekonomi, tetapi juga tentang pengakuan atas pengetahuan, peran, dan kedaulatan Perempuan Adat. Di dalamnya, tersimpan jejak perubahan yang tumbuh dari solidaritas, ruang belajar bersama, dan keberanian untuk menentukan masa depan.

Kelompok Perempuan Adat Punan Tugung sedang menganyam rotan.
Sumber Foto: PEREMPUAN AMAN Kalimantan Utara.





Delegasi AMAN Hadiri Kongres Global Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Kongo

Oleh: Titi Pangestu
Direktur INFOKOM PB AMAN

Sebanyak 300 orang perwakilan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari berbagai wilayah hutan tropis dunia menghadiri Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Aliran Sungai Hutan (*Three Basins Summit*) di Brazzaville, Republik Kongo, pada 26–30 Mei 2025.

Pertemuan bersejarah ini mempertemukan para penjaga hutan dari tiga kawasan hutan tropis terpenting di dunia—Cekungan Amazon, Cekungan Kongo, serta Cekungan Mekong–Borneo–Asia Tenggara dan Mesoamerika—yang selama ini menjaga jantung kehidupan bumi.

Kongres yang diselenggarakan oleh Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC) bersama Rights and Resources Initiative (RRI) ini turut dihadiri 22 delegasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mewakili kawasan Nusantara.

"Konferensi global ini merupakan tonggak bersejarah persatuan bagi masyarakat hutan tropis dunia. Kami datang sebagai koalisi yang hidup, dengan kearifan nenek moyang kami dan urgensi untuk membela hak-hak alam dan Masyarakat Adat. COP30 hanyalah satu perhentian; perjuangan kita jauh lebih dari itu," kata Juan Carlos Jintiaich, Sekretaris Eksekutif GATC.

*Delegasi AMAN mengikuti Kongres Three Basins Summit, di Brazzaville, Republik Kongo.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Suara Kolektif untuk Hak dan Keadilan Iklim

Kongres ini menjadi wadah penting untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam tata kelola lingkungan global, serta menegaskan bahwa mereka adalah aktor utama dalam solusi atas krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Selama pertemuan, peserta menyuarakan enam tuntutan utama sebagai putusan Kongres. Seruan ini dibacakan oleh Sekjen AMAN, Rukka Sombolnggi, menjelang penutupan acara pada 30 Mei 2025. Keenam tuntutan tersebut adalah:

1. Pengakuan, perlindungan, dan jaminan hak atas tanah dan penguasaan wilayah adat;
2. Perlindungan terhadap wilayah dan para pemimpin adat dari kekerasan dan kriminalisasi;
3. Penghormatan terhadap prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC);
4. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, sains, dan inovasi lokal;
5. Akses langsung ke pendanaan iklim dan keanekaragaman hayati;
6. Keterlibatan penuh dalam pengambilan keputusan di semua level.

"Kami bukan hanya pemangku kepentingan; kami adalah pemegang hak dan pengetahuan. Solusi kami sah dan tak tergantikan," tegas para pemimpin komunitas dalam pertemuan itu.

Dukungan dari Pemerintah Kongo

Dalam sambutannya, Menteri Ekonomi Kehutanan Rosalie Matondo menyampaikan pesan dari Presiden Denis Sassou Nguesso yang menegaskan komitmen negaranya untuk berdiri bersama Masyarakat Adat dalam perjuangan menjaga hutan.

"Kami percaya bahwa pengakuan hak atas tanah dan wilayah adalah bagian integral dari solusi iklim global. Suara mereka harus didengar, dihormati, dan dijadikan bagian dari kebijakan nasional maupun internasional," kata Presiden Denis Sassou Nguesso dalam pesan tersebut.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), para peserta kongres menyerukan agar COP30 menghasilkan warisan nyata dalam bentuk perlindungan hak atas tanah, penghentian eksploitasi wilayah adat, dan sistem pendanaan yang adil serta partisipatif.

Delegasi Asia juga secara khusus mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, serta menghentikan praktik transmigrasi, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat.



Foto Bersama Delegasi AMAN mengikuti Three Basins Summit, di Brazzaville, Republik Kongo.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Perempuan dan Pemuda Adat sebagai Pilar Perubahan

Kongres diawali dengan pra-pertemuan bertajuk *Perempuan dan Pemuda* pada 26 Mei 2025, yang mempertemukan perwakilan perempuan dan generasi muda Masyarakat Adat dari berbagai kawasan. Forum ini memperkuat solidaritas lintas wilayah serta menyusun strategi bersama dalam memperjuangkan hak atas wilayah adat, kepemimpinan komunitas, dan akses pendanaan iklim langsung.

Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Hon. Rosalie Matondo, dalam sambutannya menegaskan peran vital perempuan dan pemuda dalam keberlanjutan bumi. "Saya secara khusus berterima kasih kepada kepemimpinan perempuan Masyarakat Adat dan komunitas lokal kita yang merawat komunitas, wilayah, dan keluarga. Mereka memastikan bahwa bumi ini dapat terus mendukung generasi-generasi yang akan datang," ujarnya.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, juga menyampaikan refleksi atas perjuangan panjang komunitas Masyarakat Adat di forum internasional ini. Ia mengingatkan bahwa aliansi GATC telah dibentuk sepuluh tahun lalu, dan kini hasil kerja kolektif mulai tampak, terutama melalui kepemimpinan Perempuan Adat di Afrika. Namun Rukka juga menekankan pentingnya menyederhanakan beban administratif terhadap komunitas.

"Jika itu terjadi, maka kita justru sedang melemahkan para penjaga bumi itu sendiri," ungkapnya.

Perempuan adat memainkan peran penting dalam menjaga pengetahuan lintas generasi, dari pengelolaan benih, hutan, hingga pengobatan tradisional. Sementara itu, pemuda adat memimpin inisiatif pendidikan, kampanye digital, dan pemetaan wilayah.

Penguatan peran perempuan dan pemuda hanya mungkin tercapai bila mereka diakui sebagai aktor utama, dengan akses setara terhadap sumber daya, ruang politik, dan pengambilan keputusan. Partisipasi sejajar mereka bukanlah sekadar harapan, melainkan hak yang harus dijamin.



Foto Bersama Peserta Kongres Three Basins Summit, di Brazzaville, Republik Kongo.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Seruan untuk Pendanaan Langsung

Salah satu seruan paling tegas dari Kongres ini adalah desakan agar minimal 40% dari total pendanaan iklim global disalurkan langsung kepada organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Pendanaan ini harus dikelola melalui mekanisme yang ditentukan sendiri oleh komunitas, bukan melalui lembaga perantara yang kerap tak memahami kebutuhan nyata di lapangan.

Pendanaan langsung dipandang sebagai bentuk nyata dari pengakuan terhadap kapasitas Masyarakat Adat dalam merancang, mengelola, dan menilai program berbasis komunitas—mulai dari pemetaan wilayah adat, pembangunan sekolah adat, hingga sistem pangan berkelanjutan. Tanpa mekanisme ini, janji-janji keadilan iklim akan berhenti sebagai retorika belaka.

Menuju Konsolidasi Global Akar Rumput

Kongres Global Pertama ini menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan lintas benua. Pertemuan ini menegaskan bahwa penyelamatan bumi tidak mungkin tercapai tanpa menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra utama—bukan objek kebijakan, melainkan subjek dengan hak, pengetahuan, dan solusi nyata.

Kongres ini menandai dimulainya konsolidasi global yang dipimpin dari akar rumput. Pertemuan kedua telah direncanakan dan akan terus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas serta komitmen bersama dari komunitas penjaga hutan tropis dunia.

"Kami menyerukan semua orang untuk bergabung bersama kami. Jawabannya adalah kita, kita semua!" seru para peserta di Brazzaville.

*Hutan Adat Bajuin di Pegunungan Meratus
milik Masyarakat Adat Dayak Meratus
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



Negeri Soya dan Ritual Adat Cuci Negeri

Oleh: Joanny F. M. Pesulima
Jurnalis Masyarakat Adat Maluku



Masyarakat Adat Negeri Soya Khusyuk melaksanakan Ritual Cuci Negeri. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Negeri Soya terletak di puncak Gunung Sirimau, sekitar enam kilometer dari pusat Kota Ambon, Provinsi Maluku. Wilayah adat ini berada pada ketinggian 464 meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius. Di sebelah timur, Soya berbatasan dengan Negeri *Hutumuri* dan *Leahari*; di barat dengan *Urimessing*; di barat laut dengan pusat Kota Ambon; di selatan dengan *Hatalai*, *Naku*, *Kilang*, dan *Ema*; sementara di utara terbentang Laut Teluk Ambon. Medannya berbukit dan hijau, dapat diakses dengan kendaraan roda dua maupun empat.

Negeri ini tak hanya menyuguhkan lanskap yang asri dan udara yang sejuk, tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah. Hasil hutan seperti damar, kayu bangunan, rotan, serta rempah-rempah seperti pala, fuli, cengkeh, dan kelapa menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Buah-buahan seperti salak dan durian turut memperkaya hasil alamnya. Di sisi lain, situs-situs bersejarah seperti Gereja Tua Soya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, serta *Tempayang Sirimau* yang airnya tak pernah kering bahkan saat musim kemarau, menjadi pusat ziarah religi dan wisata budaya.



Asal-usul masyarakat Negeri Soya dapat ditelusuri hingga Pulau Seram, atau yang disebut sebagai *Nusa Ina*, tepatnya dari wilayah Seram Utara di sekitar *Sawai*—yang juga dikenal dengan nama *Soya*—serta dari Seram Barat di daerah sekitar *Tala*. Leluhur mereka berpindah secara bergelombang dan kemudian menetap di wilayah yang kini disebut Negeri Soya. Sebagai penghormatan terhadap tanah asal, mereka menamai tempat tinggal baru ini dengan nama yang sama, menandakan ikatan spiritual yang tak terputus dengan asal muasal mereka.

Migrasi itu bukan sekadar perpindahan fisik, tapi juga membawa serta sistem nilai dan organisasi sosial yang kemudian membentuk dasar tatanan adat di Negeri Soya. Negeri ini kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan adat yang membawahi sembilan negeri kecil di sekitarnya. Setiap negeri dipimpin oleh tokoh adat dengan gelar *Orang Kaya* atau *Patih*, bergantung pada struktur lokal masing-masing. Negeri-negeri tersebut antara lain Uritetu yang berarti “di balik bukit”, terletak di sekitar Hotel Anggrek; Honipopu di sekitar Kantor Kota Ambon; Hatuela, yang berarti “batu besar”, berada di antara Batu Merah dan Tantui; Amantelu atau “kampung tiga” yang terletak di dekat Karang Panjang; Haumalamang yang diperkirakan berada di Negeri Baru dekat Air Besar; Ahuseng di Kayu Putih; serta Pera, Erang, dan Sohia yang berada di sekitar Negeri Soya. Sohia merupakan pusat pemerintahan, terletak di antara Gunung Sirimau dan Gunung Horil.

Sistem pemerintahan tradisional Negeri Soya dikenal sebagai *Saniri Latupatih*, yang terdiri dari *Upulatu* (raja), para *kapitan*, *Jou* (kepala-kepala soa), *Patih*, *Orang Kaya*, *Mauweng* (kepala adat), dan kepala *Kewang*. Pelaksana harian dikenal sebagai *Marinyo*. Dalam sistem ini, masyarakat turut terlibat secara aktif melalui *Saniri Besar*, sebuah sidang tahunan yang melibatkan seluruh laki-laki dewasa dan tokoh adat, mencerminkan prinsip musyawarah dan demokrasi langsung. Belakangan, terbentuk pula *Saniri Negeri* sebagai lembaga legislatif permanen.

Di balik struktur adat ini, sejarah Soya ditopang oleh tokoh-tokoh sentral yang memperkuat legitimasi dan warisan budaya negeri, salah satunya adalah Latu Selemau. Ia merupakan raja pertama Negeri Soya, yang bergelar *Nusa Piring Pahlawan* atau *Piring Pekanussa*. Ia juga dikenal dengan gelar agung *Latu Selemau Agam Raden Mas Sultan Labu Inang Mojopahit*, yang menunjukkan hubungan sejarah dengan Kerajaan Majapahit. Bersama istrinya, *Pera Ina*, mereka menjadi figur sentral dalam sejarah awal pendirian negeri ini.

Anggur & Sesaji dalam ritual Cuci Negeri diletakkan di atas Teung (Batu Penanda kedatangan Leluhur).
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





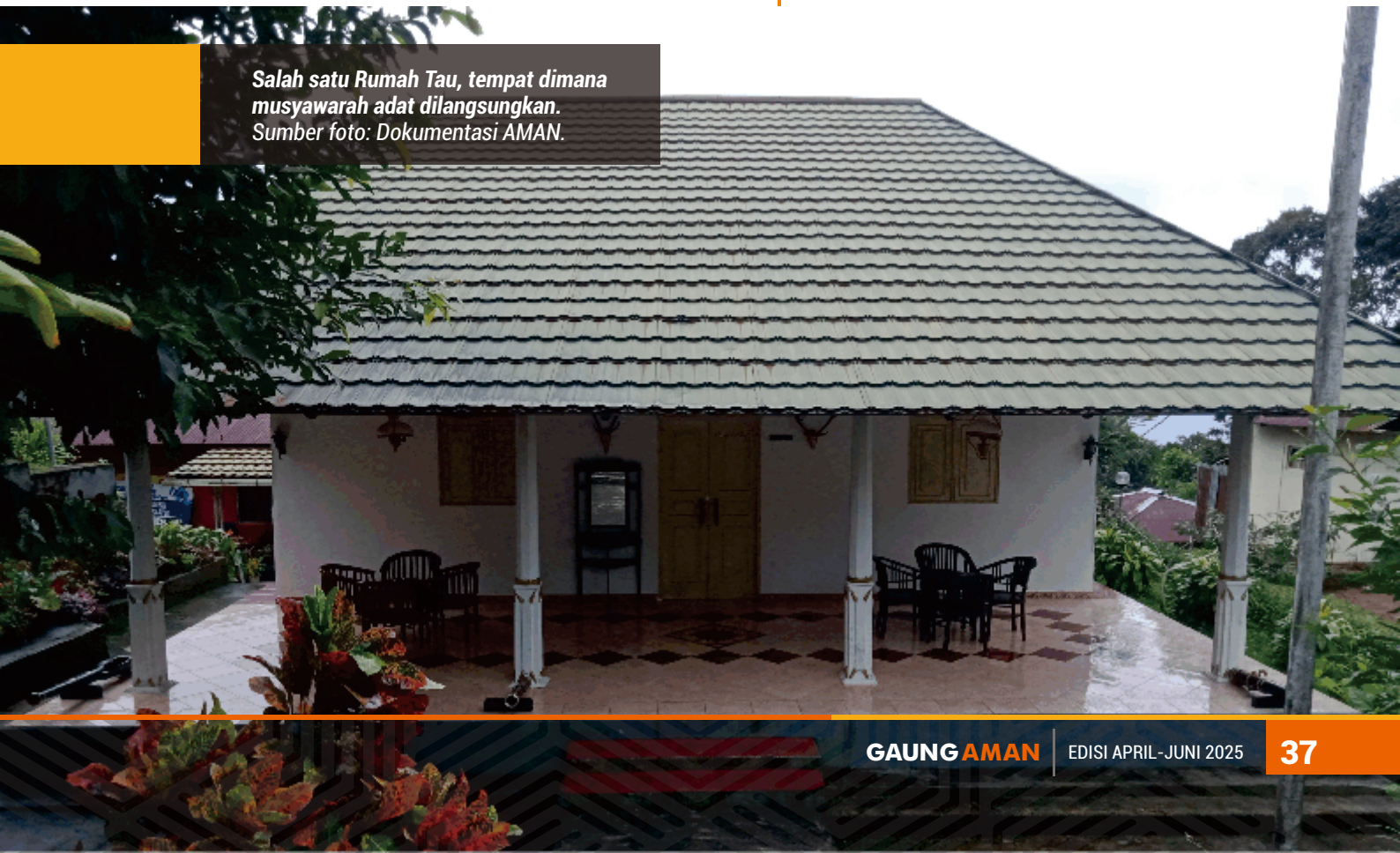
Dalam sistem sosial Masyarakat Adat Soya, setiap *Rumah Tau* atau mata rumah/marga memiliki batu penanda kedatangan leluhur yang disebut *Teung*. Batu ini menjadi simbol perahu yang membawa mereka ke negeri baru, menandakan kehadiran dan hak atas tanah yang mereka tempati. Terdapat empat belas *Teung* di Negeri Soya, masing-masing terkait dengan marga tertentu: *Teung Samurele* (Rehatta), *Teung Souhitsu* (Tamtelahittu), *Teung Saupele* (Huwa), *Teung Paisina* (Pesulima), *Teung Rulimena* (Soplanit), *Teung Pelatiti* (Latumalea), *Teung Hawari* (Latumanuwey), *Teung Soulana* (de Wana), *Teung Soukori* (Salakory), *Teung Saumulu* (Ririmasse), *Teung Rumania* (Latuconsina), *Teung Neurumanguang* (Hahury), dan *Teung Samasuru* (Latuputty). Selain itu, terdapat *Teung Tunisou* sebagai batu penanda umum bagi semua *Rumah Tau*. Dua tempat yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial adalah *Baileo Samasuru*, tempat musyawarah adat, dan *Tunisou*, perkampungan khusus untuk semua *Rumah Tau*.

Seluruh struktur adat dan sistem nilai yang diwariskan dari leluhur berpuncak pada satu momen kolektif yang menyatukan seluruh unsur masyarakat: ritual tahunan *Cuci Negeri*.

Tidak sekadar seremoni, *Cuci Negeri* adalah ruang kolektif di mana seluruh masyarakat—dari anak-anak hingga tokoh adat tertua—mengambil bagian dalam menyucikan negeri, lahir dan batin. Prosesi ini dirancang dengan susunan ritus yang sistematis dan penuh makna simbolik. Setiap tahapan mengandung pesan sosial dan spiritual, yang mengakar kuat pada sejarah dan kearifan lokal.

Rangkaian *Cuci Negeri* dimulai setiap 1 Desember dengan rapat *Saniri Besar* sebagai forum pengambilan keputusan adat. Rabu pada minggu kedua menjadi hari gotong royong, di mana masyarakat membersihkan seluruh wilayah negeri—mulai dari pelataran gereja, pekuburan, hingga *Baileo*. Kegiatan ini bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga bentuk penghormatan kepada arwah leluhur dan persiapan batin menjelang ritus puncak. Dalam momen ini pula, seorang perempuan yang baru menikah dalam tahun itu diangkat menjadi *Mata Ina Baru*—tugas suci yang menandai keterlibatan keluarga baru di Masyarakat Adat dan Komunitas.

Salah satu *Rumah Tau*, tempat dimana musyawarah adat dilaksanakan.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Pada malam Kamis, rombongan laki-laki dari Soa Pera naik ke puncak Gunung Sirimau, membawa *tifa* dan *kuli bia* (kulit siput), untuk membersihkan dan menyucikan puncak gunung. Jumat sore, mereka turun dan disambut di *Teung Rulimena* oleh warga *Soa Erang*, sebelum diarahkan menuju *Baileo*. Di sana, *Mata Ina* menyambut dengan sapaan adat:

"Tabea Upulatu Jisayehu, Nyora Latu Jisayehu, Guru Latu Jisayehu, Upu Wisawosi. Selamat datang, silakan masuk."

Upulatu kemudian menyampaikan titah tahunan, dilanjutkan dengan doa oleh pendeta. Setelah itu, kepala soa tertua berdiri dan membacakan *kapata* adat. Dalam suasana hening dan penuh khidmat, doa ini mengalir sebagai permohonan ampun, perlindungan, dan keselarasan antara manusia, leluhur, dan Tuhan:

"Kapua Upu Ilah Kahuressy Lebehanua, Kedua Yang Maha Besar Tuhan Kami, Isa Almasih, Ketiga Rohul Kudus. Upulatu Jisayehu, Upu Ama, Upu Wisawosi, Lopa Amang-Pamang Kupahareuw Pamesang-pamesang, Mahina-mahina, Malona-Malona Hai Amang Hona-Hona Pau Amang Penyakit-Penyakit tinggalkan negeri ini. Kahu Erimaang Saka Upu amang Upu Wisa Wosi Wei, Amang. Kalau-kaulu sasoi Pasala Pamanisa o Sasou Maniska Ampun Ilah-Ilah. Ene Anak Maingheru yang sekarang ada berdiri di dalam Teung Lapiang Makakuang Haumalamang, kalau Sosoupasala Pamanisa Ou Sasou Manisa ampun Ilah-Ilah, karena itu bukan barang areka urung sakakenu menyembah berhala-berhala, bukan sekali-kali, hanya sebab Hauw Enamaang Eumena Enaam Guru Haji. Upu Ilah Kahuressy Lebehanua Komsidana Upulatu Salemau Ka Hulubalang Dewana Deperneahau Amang Latu Jisayehu Sohiu (Sohia). Anak Maingheruw sekarang ada minta kalau boleh tolong-menolong lopang masim-masim kepada negeri ini supaya jangan negeri ini bersungut-sungut. Mahurung-mahurung Ambole Tatika karna saka karena Upu Ilah Kahuressy beserta Upu Latu Selemu Agam Raden Mas Sultan Labu Inang Mojopahit, kalau boleh tolong-menolong, parihu-parihu, Mahina-mahina, Malona-malona o Hija Ja Mesang Henu-Henu Humuhandeuw Minulai Halemuli Haumeat. Penu-Penu Hawa Teung Tuniwou Wala Werhalouw Rulimena Sasamasa Enamai. Ka segala selamat. Ilah yang di atas semua Ilah Yang Maha Besar Tuhan Yesus Ketiga Rohul Kudus. Raja Latu Jisayehu, beserta orang-orang tua bahkan seluruh rakyat mintakan agar menghindarkan segala bahaya kesulitan serta penyakit-penyakit dari wanita-wanita, laki-laki dan semua kekeluargaan. Kalau ada kesalahan kami mohon ampun dari Ilah dan sebagainya."



Tetua adat Negeri Soa membacakan doa dalam prosesi Ritual Adat Cuci Negeri.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Setelah pembacaan *kapata*, rombongan menuju sumber air *Wai Werhalouw* dan *Unuwei* untuk mencuci muka, tangan, dan kaki sebagai simbol penyucian diri. Setelah itu, mereka kembali ke *Teung Tunisou*, tempat di mana *Kain Gandong* dibentangkan oleh dua *Mata Ina* dari *Soa Pera*, dan diputar tiga kali sebelum rombongan bergerak ke rumah *Upulatu*. Di sana, para tokoh adat dan pemimpin negeri diselubungi *Kain Gandong* sebagai simbol persatuan dan kesetiaan terhadap nilai adat. Prosesi ditutup dengan pesta rakyat yang meriah, diiringi tabuhan *tifa*, *totobuang*, serta tarian adat yang penuh semangat dan sukacita.

Pada Sabtu pagi, masyarakat kembali membersihkan dua sumber air tersebut. Kegiatan ini menjadi simbol penguatan tanggung jawab kolektif untuk menjaga alam dan warisan leluhur. *Cuci Negeri* bukan semata tradisi, tetapi juga momentum pendidikan budaya yang menyampaikan nilai-nilai gotong royong, kesucian hidup, dan keutuhan sosial kepada generasi muda. Unsur animisme dan dinamisme yang dahulu hidup dalam praktik leluhur, kini telah selaras dengan ajaran Kristen, menciptakan harmoni antara adat dan agama.

Mantan Raja Negeri Soya, John L. Rehatta—ayah dari raja saat ini, Herve Rehatta—menegaskan bahwa *Cuci Negeri* bukan ritual yang bisa ditiru atau direkayasa. Di dalamnya hidup semangat musyawarah, toleransi antar generasi, dan penghormatan pada sejarah. Kepala *Soa Pera*, Thomas Tamtelahittu, menyatakan bahwa di Negeri Soya terdapat dua *soa*: *Soa Pera*, marga asli yang terdiri dari Rehatta, Huwaa, Pesulima, dan Tamtelahittu; serta *Soa Erang*, yang berasal dari marga pendatang dan dipimpin oleh Ferdinand Soplanit. *Rumah Tau* Rehatta merupakan *Mata Rumah Parentah* yang bertanggung jawab atas jalannya upacara.

Ferdinand Soplanit menjelaskan bahwa *Teung Rulimena*, tempat awal penyambutan, berarti “mari masuk” dan menjadi lambang keterbukaan dan kesatuan. Ia menekankan bahwa *Kain Gandong* bukan hanya lambang persatuan antara dua *soa*, tetapi juga simbol tanggung jawab adat yang tak dapat diwakilkan kepada siapa pun.

Melalui ritual tahunan ini, masyarakat Negeri Soya tak hanya menjaga hubungan spiritual dengan tanah dan leluhur, tetapi juga meneguhkan identitas budaya di tengah perubahan zaman. *Cuci Negeri* adalah cara menyapa masa depan dengan keyakinan bahwa warisan adat bukan beban masa lalu, melainkan cahaya yang menuntun langkah ke depan.

Para Perempuan Adat melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dalam prosesi ritual adat cuci negeri.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Nai Sinta dalam Kenangan 40 tahun Perlawanan Mengusir TPL

Oleh: Maruli Simanjuntak & Nestor Tambun
Jurnalists Masyarakat Adat Tano Batak

Nai Sinta, perempuan pejuang tanah adat wafat dalam usia 89 tahun. Kepergiannya meninggalkan jejak perjuangan dalam membela hak atas tanah leluhur, keadilan dan martabat sebagai Masyarakat Adat sangat menginspirasi bagi pergerakan Masyarakat Adat.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Nai Sinta. Rukka mengenang Nai Sinta sebagai salah seorang sosok pejuang gerakan Masyarakat Adat yang tangguh di masa Orde Baru. Nai Sinta berani melawan rezim Soeharto kala itu dan perusahaan PT. Inti Indorayon Utama yang ingin merampas tanah adat.

"Nai Sinta, perempuan tangguh yang menginspirasi perjuangan Masyarakat Adat. Ia mengorganisir perempuan adat untuk berdiri di garis depan ketika aparat menggunakan kekerasan," kenang Rukka usai mendapat kabar meninggalnya Nai Sinta.

Rukka menyebut Nai Sinta telah membuka jalan bagi kesetaraan dalam kepemimpinan Masyarakat Adat. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) tahun 1999, Nai Sinta bersama perempuan lainnya memperjuangkan agar perempuan adat berhak untuk memimpin.



*Nai Sinta, Pejuang Adat dari Tano Batak.
Sumber Foto:
Dokumentasi AMAN.*



"AMAN mewarisi nilai itu. Perempuan adat bukan hanya pendukung, mereka adalah pemimpin perjuangan," tegasnya.

Dalam suasana duka, Rukka mengajak seluruh Masyarakat Adat untuk meneladani semangat Nai Sinta.

"Kita beruntung punya panutan sekuat beliau. Kita harus melanjutkan perjuangannya, khususnya di Tano Batak, untuk merebut kembali tanah leluhur dari tangan PT Toba Pulp Lestari. Tidak boleh ada kata menyerah," ungkap Rukka penuh semangat.

Salah satu tonggak perjuangan Nai Sinta yang paling dikenang terjadi pada tahun 1988. Saat itu, ia memimpin langsung aksi perlawanan terhadap perampasan tanah adat di Sugapa. Nai Sinta bersama sembilan ibu lain dari Desa Sugapa, Kec. Silaen, Toba Samosir, nekad melawan PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang menanam ekaliptus di tanah adat warisan Raja Sidomdom Baringbing, di ladang Parbarungan.

Ketika itu, Indorayon mengklaim ladang Parbarungan sebagai wilayah konsesi mereka dengan membayar uang "*pago-pago*" kepada beberapa orang pengkhianat tanah ulayat. Tanpa kenal takut, Nai Sinta memimpin gerakan untuk mencabuti tanaman ekaliptus yang ditanami Indorayon, hingga mereka ditangkap dan dipidanakan perusahaan. Putusan pengadilan memutuskan mereka dijatuhi hukuman percobaan enam bulan.

"Kami sengaja. Kalau suami kami yang maju, pasti mereka ditangkap dan dipenjarakan. Kami tidak mau," ujar Nai Sinta mengenang peristiwa itu.

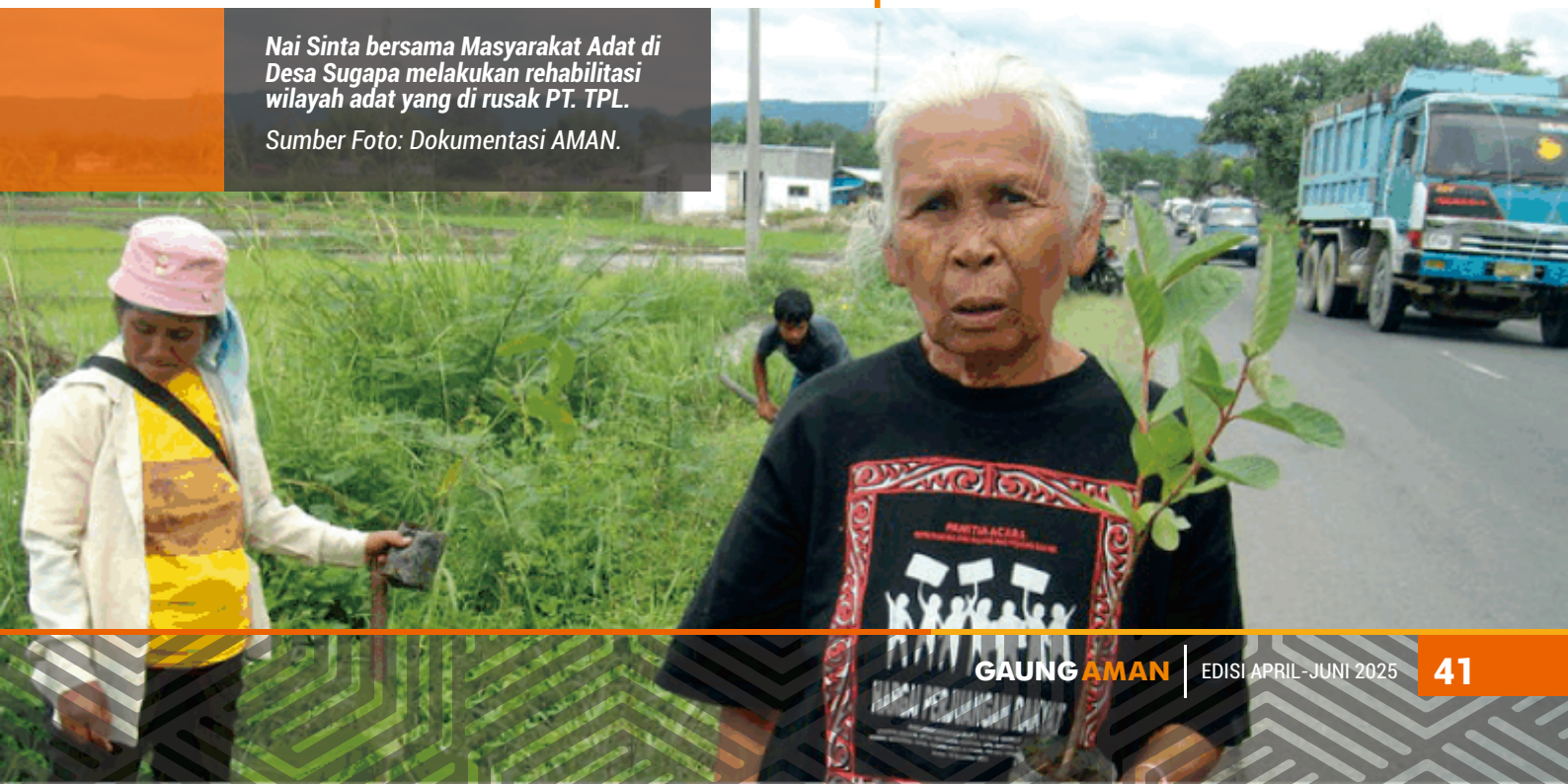
Nai Sinta beserta kawan-kawannya tidak mau menyerah. Mereka mengajukan banding, tapi kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan mereka. Namun perjuangan tidak berhenti. Sepuluh orang inang (ibu) ini nekat pergi ke Jakarta, dengan berhutang untuk biaya. Mereka membawa anak-anaknya menemui Menteri Dalam Negeri.

Berhari-hari para perempuan adat ini duduk di lobi kantor Kementerian Dalam Negeri. Saat itu Nai Sinta juga tengah mengandung, hingga Menteri Dalam Negeri Rudini tersentuh hatinya dan bersedia menerima mereka. Rudini kemudian membantu biaya kepulangan mereka dan membekali mereka surat, agar Bupati dan Indorayon menyerahkan kembali tanah mereka.

Sejak itu, Indorayon yang kemudian berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari (TPL) tidak pernah lagi mengganggu tanah adat mereka, dan hengkang dari Sugapa. Keberhasilan itu menempatkan Nai Sinta dan kawan-kawannya sebagai simbol perjuangan Masyarakat Adat.

Nai Sinta bersama Masyarakat Adat di Desa Sugapa melakukan rehabilitasi wilayah adat yang di rusak PT. TPL.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Pemimpin Perlawanan

Abdon Nababan selaku tokoh Masyarakat Adat dari Tano Batak dan Sekjen AMAN 2 Periode (2007-2012 & 2012-2017) mengenang Nai Sinta sebagai sosok yang sangat melekat dalam sejarah lahirnya organisasi AMAN. Abdon menyebut, perjuangan kaum perempuan dari Sugapa yang dipimpin Nai Sinta menjadi salah satu api semangat yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi AMAN.

"Keberanian dan keteguhan hatinya dalam mempertahankan tanah adat menginspirasi banyak pemimpin dan aktivis untuk bersatu," ungkap Abdon.

Nai Sinta tercatat sebagai peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pertama di Jakarta pada Maret 1999, sebuah peristiwa bersejarah yang melahirkan AMAN. Nai Sinta datang bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) ke KMAN sebagai perwakilan Masyarakat Adat dari Tano Batak. Sejak itu, Nai Sinta tercatat sebagai salah satu pendiri AMAN.

Menurut Abdon, Nai Sinta mendapat label sebagai pemimpin perlawanan karena kharismanya sangat kuat. Nai Sinta tidak pernah goyah dalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat hingga usia lanjut.

"Sikap kritis, keberanian, dan konsistensi perjuangan menjadi warisan Nai Sinta yang harus dilanjutkan oleh generasi muda mendatang," tuturnya.

Direktur KSPPM Rocky Pasaribu juga mengenang Nai Sinta sebagai sosok teladan sekaligus guru pergerakan.

"Ia mengajarkan kami arti keberanian, konsistensi, dan kemampuan mengorganisir rakyat. Strateginya masih menjadi inspirasi dalam setiap advokasi kami," ujarnya.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Tano Batak Jhontoni Tarihoran menyebut Nai Sinta sebagai simbol perjuangan perempuan adat yang tidak tergantikan. Sejak dekade 80an, Nai Sinta telah memimpin perlawanan bersama sembilan orang perempuan melawan PT. TPL.

"Sampai akhir hayatnya, semangat Nai Sinta tidak pernah padam. Ia adalah pelita perjuangan Masyarakat Adat Nusantara," jelasnya.

Pdt. Jurito Sirait, tokoh gereja di Tano Batak turut menyampaikan penghormatan atas meninggalnya Nai Sinta. Menurutnya, Nai Sinta adalah suara kenabian di tengah masyarakat. Suara perempuan yang tidak gentar menyuarakan kebenaran, keadilan, dan cinta tanah leluhur. Dalam perjuangan ini, sebutnya, Nai Sinta menjadi teladan iman yang hidup—iman yang membela ciptaan Tuhan dari keserakahan dan ketidakadilan.

"Kepergiannya adalah kehilangan besar, tapi warisannya akan terus hidup dalam setiap langkah perlawanan kita," pungkasnya.

Nai Sinta bersama 2 orang pejuang adat dari Tano Batak yang berjuang melawan PT. TPL.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Menjaga Wilayah Adat, Menyusun Strategi, Menembus Benteng Kekuasaan

Oleh: Tim Infokom PB AMAN

Militerisasi ruang hidup hadir bukan hanya lewat seragam dan senjata, tapi juga lewat aturan hukum dan proyek pembangunan yang meminggirkan. Di tengah arus itu, Masyarakat Adat tetap bergerak: membangun kekuatan di tapak, menyuarakan tuntutan di parlemen, dan mengkonsolidasikan barisan.

Galeri ini adalah cuplikan dari perjuangan panjang yang tak mengenal batas ruang: dari kampung, jalanan, hingga ruang sidang.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolingi bersama DAMANNAS & Kepala Adat Sumping Layang Kedang Ipil membuka acara Rakernas AMAN VIII di Kutai Adat Lawas Sumping Layang Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, Kaltim.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi disambut oleh Ketua Adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang Kedang Ipil, dalam rangkaian acara Rakernas AMAN VIII
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





*Masyarakat Adat Kutai Adat Lawas
Sumping Layang dengan pakaian adatnya.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Musik Tradisional yang dimainkan Masyarakat Adat untuk menyambut peserta Rakernas AMAN VIII di Kampung Kedang Ipil.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





*Sidang Uji Formil menggugat UU KSDAHE
di Mahkamah Konstitusi 06 Mei 2025
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



*Rapat Dengar Pendapat dengan DPD-RI
tentang RUU Masyarakat Adat
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Masyarakat Adat di Raja Ampat melakukan aksi menolak tambang nikel di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Tikalla, Toraja menolak aktivitas Tambang di wilayah Adatnya
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Enggano & Koalisi Masyarakat Sipil di Bengkulu melakukan Aksi Massa menuntut Operasional Kapal penyeberangan Bengkulu-Pulau Enggano yang mandek selama lebih dari 3 bulan dengan alasan pendangkalan pelabuhan Teluk Baai Bengkulu
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat dari Tano Batak & Solidaritas Masyarakat Sipil melakukan Aksi di depan gedung Mahkamah Agung menuntut penutupan PT TPL & pembebasan Sorbatua Siallagan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





LAPORAN KEUANGAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA per 30 Juni 2025

Penerimaan Dana	Jumlah
The Tenure Facility	7.611.843.514,35
NICFI	5.661.215.364,92
SKOLL Award	2.698.832.410,18
OSF - AMAN	7.014.258,68
CLUA - FPCI	23.779.903.386,70
CLUA - Michigan	726.422.336,00
Thousand Currents	3.677.221.808,98
NDI	450.358.246,53
Pawanka Wayfinders	666.512.103,00
The Christensen Fund	2.142.668.013,00
Packard	3.264.722.475,00
Saldo	47.421.991.442,34
Dana iuran dan Sumbangan-sumbangan	
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	271.390.312,07
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	100.948.153,99
Dana Organisasi per 30 April 2025	
Kas	10.000.000,00
KMAN VII	550.000.000,00
Dana Organisasi	3.777.319.744,00
Dana Resiliency	5.058.636.442,37
Dana Tanggap Darurat	4.731.619.742,02


**LAPORAN
KEUANGAN
TANGGAP
DARURAT/
EMERGENCY
RESPOND
(ER) AMAN**

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		504.184.783,76
Penerimaan		
20 April 2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4 Mei 2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23 Juni 2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
10 Juli 2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18 September 2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
27 Oktober 2020	IFAD	33.960.000,00
16 Desember 2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24 Februari 2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12 April 2021	CLUA	68.122.729,00
27 Juli 2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13 Agustus 2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25 Agustus 2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10 September 2021	CLUA	52.968.750,00
22 Oktober 2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8 November 2021	Packard	5.659.759.450,00
29 Juni 2022	Skoll	171.250.000,00
5 Juli 2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
17 Oktober 2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000,00
14 Desember 2022	Tenure Facility	498.244.499,00
14 Maret 2023	Skoll	866.000.000,00
14 Maret 2023	Ballmer	2.238.445.800,00
20 September 2023	Wikimedia	73.994.450,00
6 Desember 2023	Tenure Facility	516.069.260,00
31 Januari 2024	Clarifi	150.000.000,00
3 April 2024	Silicon Valley	29.777.000,00
29 April 2024	Nia Tero	18.750.000,00
13 September 2024	Matata	3.000.000,00
19 Oktober 2024	Tenure Facility	582.687.360,00
13 September 2024	Pawanka	19.250.000,00
13 Januari 2025	NDI	61.625.000,00
6 Juni 2025	Niaterro	3.999.439,00
Total Dana ER AMAN		17.842.005.486,76
Pengeluaran per 30 Juni'25		13.110.385.744,74
Sisa dana menurut bank Per 30 Juni 2025		4.731.619.742,02
Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukkungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain		



LAPORAN IURAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT ANGGOTA AMAN

April-Juni 2025

Nama Komunitas	Iuran
Desa Tiga Berkat	120.000
Dusun Sempayuk	120.000
Binua Gajekng Hulu	120.000
Benua Kanyatn	120.000
Binua Gejekng Hilir	120.000
Binua Sawak Hulu	120.000
Dayak Bina'eh Kampung Tamong	120.000
Dayak Bakati Sekaruh	120.000
Binua Lumar	120.000
Binua Palayo	120.000
Binua Garatukng Bekayang, Sakawong	120.000
Dayak Bakati Bantakng Baremada	120.000
Dayak Bakati Raka-Reuk & Dayak Bidayuh Sahan	120.000
Dayak Bakati Riuk Sebalos	120.000
Dayak Bakati Sara Kampong Dawar	120.000
Dayak Iban Semunying Jaya	120.000
Lewu Langgah	360.000
Hampatung	240.000
Baneara	240.000
Meka Mungkur	120.000
Mungkur Getcih	120.000
Mungkur Rambung Bencarir	120.000
Mungkur Lembaga	120.000
Mungkur Sitanduk	120.000
Teweh Tengah	120.000
Ompu Mamontang	480.000
Kasepuhan Bayah	120.000
Tumbang Tujuh	120.000
Total	4.200.000



**LAPORAN IURAN KADER
MASYARAKAT ADAT ANGGOTA AMAN**
April-Juni 2025

Nama Kader	Iuran	Nama Kader	Iuran
Purwanto	24000	Wiwini Herayani	120000
Darmasi	24000	Kharisma	168000
Martandan	24000	Tania	72000
Markos	24000	Frily	48000
M. Rasyd Ridha	50000	Gabriel	72000
Sudarli	120000	Glen Walujan	72000
Danil D Pulang	50000	Imanuel Kaloh	72000
N Eric Suriawan	120000	Nedine Helena Sulu	120000
Bernad B. Aritonang	120000	Djarna Patilima	100000
Alfianus Genesius Rinting	120000	Silviana Roringkon	100000
Ali Akbar Meka	24000	Imin Tinumbia	100000
Selamat Mungkur	24000	Bima Andri Datunsolang	100000
Darwin Mungkur	24000	Andiman	24000
Harapan Meka	24000	Mardiana	24000
Poltak Meka	24000	Jonperi Ujung	48000
Ganda Sinaga	24000	Braponci Endrile	120000
Yusniar Tampubolon	24000	Peresto	144000
Masdalipah Pasaribu	24000	Iwan Kastiawan	24000
Yusnia Ramayanti Meka	24000	Yeni Noviantini	24000
Esau	120000	Yuliana Lahude	120000
Total			2.684.000



Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA): Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat

Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) adalah lembaga usaha yang dibentuk, didirikan, dan dimiliki secara mandiri oleh komunitas Masyarakat Adat. Tujuannya adalah mengelola berbagai aset serta potensi ekonomi yang terdapat di wilayah adat guna meningkatkan kesejahteraan Komunitas Masyarakat Adat.

BUMMA dan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) mengelola berbagai usaha produktif di sektor pangan lokal, kerajinan, hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan jasa lingkungan. Di tingkat daerah serta komunitas, BUMMA dan KUMA digerakkan oleh Kader-Kader Masyarakat Adat yang memiliki semangat untuk mengembangkan potensi ekonomi menjadi usaha berkelanjutan. Keberadaan BUMMA juga memperkuat jaringan pemasaran, meningkatkan kapasitas komunitas, serta menjaga stabilitas harga yang kerap dipermainkan oleh tengkulak.

BUMMA memiliki karakter khas dalam pengelolaannya, seperti kepemilikan kolektif oleh Masyarakat Adat, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, serta tata kelola berbasis gotong royong. Keuntungan yang diperoleh dialokasikan untuk pengelola BUMMA, kelembagaan adat, dan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat. Selain itu, BUMMA memastikan sistem produksi yang berkelanjutan dan pemasaran yang adil.

Keberadaan BUMMA diharapkan mampu menjadi solusi bagi penguatan ekonomi komunitas yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Informasi lebih lanjut mengenai BUMMA dapat menghubungi :

1. **Feri Nur Oktaviani,**
No Telp. : 0813 2765 7138
Email : ferinur@aman.or.id
2. **Arifin "Monang" Saleh,**
No Telp. : 0812 1833 4211
Email : arisaleh@aman.or.id



*Kopi Arabica yang diproduksi oleh BUMMA
Simahiyang, Dangiang Batuwangi, Garut.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

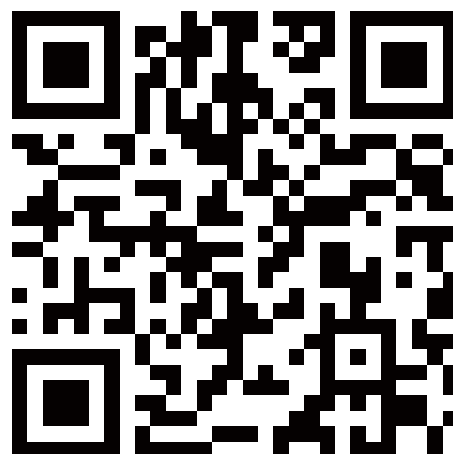


Waktunya Masyarakat Adat Mendapatkan Pengakuan & Perlindungan Hukum

Lebih dari 70 tahun, Masyarakat Adat di Indonesia telah berjuang untuk diakui hak-haknya secara resmi. Dengan adanya Undang- Undang Masyarakat Adat, kita punya kesempatan untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi Masyarakat Adat. Dukungan kita sangat dibutuhkan!

Tandatangani Petisi Dukungan Sahkan RUU Masyarakat Adat di [change.org](https://www.change.org) untuk mendesak Pemerintah & DPR RI agar segera mengesahkan Undang-undang Masyarakat Adat. Setiap tanda tangan berarti suara solidaritas untuk menjaga hak-hak Masyarakat Adat.

Scan QR code berikut untuk ikut mendukung perjuangan Masyarakat Adat! Suarakan dukungamu sekarang!



<https://www.change.org/p/sahkan-ruu-masyarakat-adat>

LEMBUR NUSANTARA

Pusat Pengetahuan
Masyarakat Adat
untuk Dunia

Dukung dan bantu kami membangun Lembur Nusantara, salurkan donasi anda melalui:

Rekening Bank Mandiri KCP Pejaten, Jakarta
a/n Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
127-00-0710036-3

Lembur Nusantara adalah inisiatif strategis untuk membangun pusat pengetahuan berbasis nilai-nilai Masyarakat Adat. Di tengah krisis ekologis global, Masyarakat Adat menawarkan cara hidup dan sistem pengetahuan yang telah terbukti menjaga keseimbangan alam. Lembur Nusantara menjadi ruang belajar dan kolaborasi lintas generasi, yang menggabungkan praktik adat dengan ilmu pengetahuan terkini. Di tempat ini, inovasi lahir dari tradisi—bukan untuk menggantikan, tetapi untuk menguatkannya.

Pembangunan Lembur Nusantara tidak sekadar terinspirasi dari arsitektur rumah adat, tetapi berlandaskan pada pengetahuan Masyarakat Adat sebagai fondasi utama di setiap prosesnya. Lembur Nusantara bukan hanya simbol, tetapi infrastruktur nyata untuk masa depan. AMAN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan dan penguatan Lembur Nusantara. Bergabunglah dalam membangun Lembur Nusantara—rumah pengetahuan yang bertumpu pada keberlanjutan, kedaulatan dan keadilan ekologis.

